KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

L K j I P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

TA. 2021

BAPPEDA

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BAPPEDA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SEKRETARIAT BAPPEDA SUBBAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU JALAN JOHARI DAGANG, SELATPANJANG
TELP. 0763 – 434703 FAX. 0763 - 434703

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP merupakan sebuah kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi BAPPEDA atas penggunaan angggaran tahun 2021 sekaligus sebagai bentuk tanggapan dan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP BAPPEDA di tahun sebelumnya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi capaian kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan dari penyusunan LKjIP BAPPEDA adalah untuk memberikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

LKjIP yang disusun tentu tidak terlepas dari kendala yang dihadapi, dengan demikian kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja BAPPEDA yang lebih baik lagi. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan manfaat lebih terhadap perkembangan dan pembangunan daerah.

Selatpanjang, 22 Januari 2022
Plt. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kepulauan Meranti,

M. SAKINUL WADI, S.H.I
Penata TK I / III d
NIP. 19800823 201102 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA ini memberikan gambaran tentang capaian kinerja BAPPEDA pada tahun 2021. LKjIP selain sebagai alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja BAPPEDA di waktu yang akan datang. Diharapkan BAPPEDA melalui cara ini senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek- praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus. LKjIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta catatan-catatan penting dalam pencapaian sasaran. Selain itu, LKjIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan termasuk sebagai bentuk tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP BAPPEDA oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di tahun sebelumnya.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 7 (tujuh) indikator kinerja berada di interval 95-100 atau sangat berhasil. BAPPEDA dalam pelaksanaan tugasnya masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan perangkat regulasi dari pemerintah pusat yang belum lengkap dan jumlah ASN di kantor BAPPEDA yang terbatas. LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum BAPPEDA 2
1.3 Tugas dan Fungsi 8
1.4 Isu Strategis 8
1.5 Landasan Hukum 9
1.6 Sistematika Penulisan 10
BAB II 12
PERENCANAAN KINERJA 12
2.1. Rencana Strategis 12
2.2. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA 15
2.3. Perjanjian Kinerja 15
BAB III 17
AKUNTABILITAS KINERJA 17
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 17
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 18
3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 19
3.4 Akuntabilitas Keuangan 33
BAB IV 42
PENUTUP 42
DATA EVIDEN 44

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Pembagian ASN BAPPEDA Berdasarkan Jabatan 4
TABEL 2 Pembagian ASN BAPPEDA Berdasarkan Golongan..... 4
TABEL 3 Pembagian ASN BAPPEDA Berdasarkan Jenis Kelamin 4
TABEL 4 Komposisi ASN berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan... 5
TABEL 5 Sarana dan prasarana kerja di BAPPEDA..... 6
TABEL 6 Isu Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah..... 9
TABEL 7 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan BAPPEDA 14
TABEL 8 Indikator kinerja utama BAPPEDA Tahun 2021 15
TABEL 9 Perjanjian kinerja BAPPEDA Tahun 2021 16
TABEL 10 Program dan Alokasi Dana BAPPEDA Tahun 2021..... 16
TABEL 11 Kode warna persentase capaian target kinerja instansi pemerintah 20
TABEL 12 Kode warna realisasi capaian kinerja di bawah 100% 17
TABEL 13 Capaian kinerja utama BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021.....18
TABEL 14 Analisis Pencapaian Tersusunnya Dokumen Perencanaan Yang Aspiratif.... 20
TABEL 15 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Tersusunnya Dokumen Perencanaan Yang Aspiratif..... 20
TABEL 16 Analisis pencapaian terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah..... 24
TABEL 17 Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah 264
TABEL 18 Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 26
TABEL 19 Hasil evaluasi SAKIP BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 267
TABEL 20 Analisis pencapaian meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.....297
TABEL 21 Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 297
TABEL 22 Analisis pencapaian meningkatnya kinerja pelayanan aparatur..... 29
TABEL 23 Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran meningkatnya kinerja pelayanan aparatur 320
TABEL 24 Analisis pencapaian meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah 332
TABEL 25 Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah. 353
TABEL 26 Akuntabilatas keuangan BAPPEDA Tahun 2021. 35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah yang dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terwujud dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). BAPPEDA selain sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah, juga melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2021 sesuai tugas dan fungsinya di bidang perencanaan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perwujudan akuntabilitas kinerja BAPPEDA itu ditunjukkan melalui penyampaian informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran kinerja, dengan disertai realisasi indikator kinerja dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi capaian lainnya serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum BAPPEDA

BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan. Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 87 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun susunan organisasi di BAPPEDA terdiri dari:

a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari;
   (1) Sub bagian Perencanaan Program;
   (2) Sub bagian Keuangan; dan
   (3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari;
   (1) Sub bidang Perencanaan dan Pendanaan;
   (2) Sub bidang Data dan Informasi; dan
   (3) Sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari;
   (1) Sub bidang Pemerintahan;
   (2) Sub bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
   (3) Sub bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
e. Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari;
   (1) Sub bidang Perekonomian;
   (2) Sub bidang Sumberdaya Alam; dan
   (3) Sub bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari;
   (1) Sub bidang Sosial dan Pemerintahan;
   (2) Sub bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
   (3) Sub bidang Inovasi dan Teknologi.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

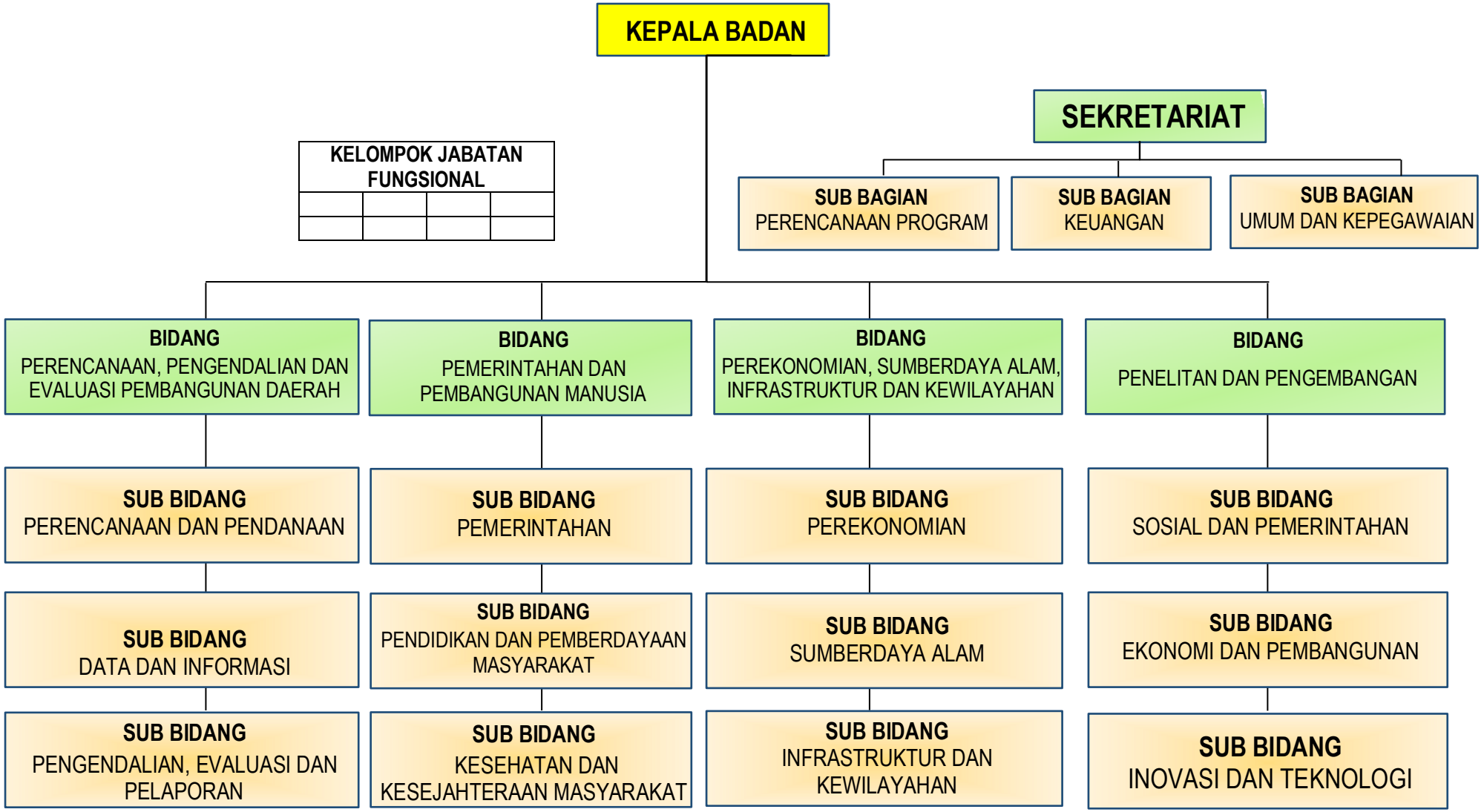

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan organisasi. Pegawai yang berkualitas dan profesional sangat diharapkan untuk mempercepat dan menjamin tercapainya tujuan dan fungsi organisasi yang ditetapkan. Lebih lanjut SDM yang handal juga merupakan ciri dari kepemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparan, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif.

TABEL 1. Pembagian ASN BAPPEDA Berdasarkan Jabatan

No	Golongan Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II.b	-		-
2	Eselon III.a	1	-	1
3	Eselon III.b	4	1	5
4	Eselon IV.a	8	4	12
5	Eselon IV.b	-	-	-
6	Fungsional tertentu	-	-	-
7	Fungsional Umum	3	7	10
8	Tenaga Harian Lepas	13	8	21
	Jumlah	29	20	49

TABEL 2 Pembagian ASN BAPPEDA Berdasarkan Golongan

No	Golongan	PNS	PPPK	Jumlah
1	Golongan IV	3	1	4
2	Golongan III	11	10	21
3	Golongan II	1	2	3
	Jumlah	16	13	28

TABEL 3 Pembagian ASN BAPPEDA Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	PPPK	Jumlah
1	Laki-Laki	16	13	29
2	Perempuan	12	8	20
	Jumlah	28	21	49

Pelaksanaan roda organisasi BAPPEDA didukung oleh 49 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas 28 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan berdasarkan komposisi laki-laki dan perempuan, terdiri dari 29 orang ASN Laki- laki dan 20 orang ASN Perempuan.

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, distribusi tingkat pendidikan ASN BAPPEDA adalah pendidikan S-2 sebanyak 7 orang (14,3%), S-1 sebanyak 21 orang (49%), kemudian pendidikan vokasi/diploma sebanyak 7 orang (14,3%),SMA sebanyak 12 orang (24,5%), SLTP 1 orang (0,5%) dan Sekolah Dasar 1 (0,5%) orang dimana semuanya merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai BAPPEDA yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja BAPPEDA secara umum.Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai BAPPEDA yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja BAPPEDA secara umum. Secara ringkas kondisi kepegawaian BAPPEDA seperti disajikan pada gambar di bawah ini:

TABEL 4. Komposisi ASN berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	PPPK	Jumlah
1	Strata Tiga (S3)			
2	Strata Dua (S2)	6	1	7
3	Strata Satu (S1)	17	4	21
4	Diploma IV (D.4)	-	-	-
5	Diploma III (D.3)	4	3	7
6	Diploma II (D.2)			-
7	SLTA / Sederajat	1	11	12
8	SLTP/ Sederajat	0	1	1
9	SD/ Sederajat	0	1	1
	Jumlah	28	21	49

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, tingkat pendidikan ASNBAPPEDA yang paling banyak adalah pendidikan S-2 sebanyak 4 orang (8,69%), S-1 sebanyak 20 orang (43,47%), kemudian pendidikan vokasi/diploma sebanyak 8 orang (17,39%), dan SMA sebanyak 14 orang (30,43%) dimana semuanya merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai BAPPEDA yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja BAPPEDA secara umum.

Kantor BAPPEDA terletak di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Johari Dagang Nomor 1 dengan luas bangunan 510 m². Untuk menunjang kinerja pelayanan ASN di lingkungan Kantor BAPPEDA, sarana dan prasarana kerja di sebar di sekretariat dan bidang-bidang. Adapun kondisi keadaan sarana dan prasarana kerja tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini:

TABEL 5 Sarana dan prasarana kerja di BAPPEDA

No	Klasifikasi Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda Empat	2	
2	Kendaraan Roda Dua	17	
3	Gerobak Dorong	3	2 Rusak Berat
4	GPS	2	
5	Mesin Tik	2	2 Rusak Berat
6	Mesin Foto Copy	1	
7	Lemari Besi	29	
8	Filling Kabinet	36	
9	Brankas Besi	1	
10	Lemari kayu	15	6 rusak berat
11	Lemari Kaca	2	
12	Lemari Makanan	2	1 rusak berat
13	Lemari Buku	5	
14	Rak Besi Arsip	1	
15	Whiteboard	5	1 rusak berat
16	Papan data	2	
17	Mesin Penghancur Kertas	5	2 rusak berat
18	Papan Nama Instansi	1	
19	Papan Nama Satuan	1	
20	Kursi Putar	104	7 rusak berat
21	Kursi Tamu	4	
22	Kursi Rapat	135	4
23	Kursi Lipat	1	Rusak berat
24	Meja	83	16 rusak berat
25	Meja Rapat	28	2 Rusak Berat
26	Karpet	2	

27	Gorden	1	
28	Rak TV	2	
29	Pot Bunga	30	
30	Partisi	1	
31	Kursi Ruang Tunggu	1	
32	Meja Kerja Kepala Badan	1	
33	Meja Satpam	1	
34	Meja Kerja Sekretaris	1	
35	Meja Kerja kasubbid	15	
36	Lemari Panjang	1	
37	Vacum Cleaner	1	
38	Mesin Potong Rumput	2	
39	Kipas Angin	**5**	
40	Lemari Es/Kulkas	2	
41	AC	11	5 rusak
42	Rak Piring	1	
43	Westafel Rak Piring	1	Rusak berat
44	Dispenser	7	
45	Televisi	5	2 rusak berat
46	Tangga	3	1 rusak berat
47	Handycam	1	Rusak berat
48	UPS	31	Rusak berat
49	Wireles	1	
50	Sound System	1	
51	Stabilizer	3	
52	Filter Air	1	
53	Tabung Pemadam Kebakaran	11	
54	Komputer PC	39	14 rusak berat
55	Laptop	34	18 rusak berat
56	Harddisk Eksternal	31	
57	Printer	60	43 rusak
58	Modem USB+Sim Card CDMA	11	
59	Intercom	11	
60	Proyektor/LCD	8	4 rusak
61	Kamera Digital	6	6 rusak
62	CCTV	14	
63	Parabola/Reciever	1	Rusak berat
64	Alat Peraga	1	
65	Sentelop/senter	3	Rusak Berat
66	Pentungan	1	Rusak Berat
67	Jaket	1	Rusak Berat
68	Sangkur	4	Rusak Berat
69	Meja Tenis Meja	2	1 rusak berat

1.3 Tugas dan Fungsi

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAPPEDA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.4 Isu Strategis

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

TABEL 6 Isu Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Aspek	Isu Strategis
1	Koordinasi dan kualitas perencanaan	➢ Belum optimalnya pengaplikasian dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun BAPPEDA baik oleh internal BAPPEDA maupun oleh dinas teknis terkait. ➢ Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, dalam untuk menjaga konsistensi/ kontinuitas perencanaan dan penganggaran;
2	Sistem perencanaan/sistem pengelolaan data	➢ Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan dokumen perencanaan yang dapat menghimpun seluruh produk BAPPEDA secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan mudah didapatkan; ➢ Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan; ➢ Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam; ➢ Masih kurangnya dokumen hasil kajian / cetak biru perencanaan pembangunan
3	Sumber daya manusia	➢ Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya; ➢ Belum terimpementasinya standar kinerja yang terukur dengan baik bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan BAPPEDA; ➢ Belum terlaksananya kebijakan pemerintah yang mendukung Jabatan Fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan LKjIP BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 87 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Lampiran 2 Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan LKjIP BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued)* yang sedang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti. Sub bahasan

mencakup Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis, Dasar Hukum, serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KERJA

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang kerangka pengukuran kinerja, capaian indikator kinerja utama, pengukuran dan analisis capaian kinerja sasaran serta akuntabiltas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKjIP BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tahap II RPJPD Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang ingin diwujudkan pada periode 2016 - 2021 adalah :

"MENJADIKAN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN NIAGA YANG MAJU DAN UNGGUL DALAM TATANAN MASYARAKAT MADANI"

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Meranti 2016-2021 maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016-2021 meliputi:

1. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dan nilai-nilai luhur kebudayaan melayu dalam rangka mewujudkan masyarakat madani;
2. Mewujudkan kawasan niaga;
3. Meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat;
4. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan potensi daerah;
6. Meningkatkan infrastruktur dasar dan optimalisasi penataan ruang;
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, ditinjau dari tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai Perangkat Daerah urusan perencana, secara umum tugas BAPPEDA terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun secara khusus, tugas dan fungsi BAPPEDA berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-4 yaitu “Mewujudkan Penataan Birokrasi Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Efektif dan Efisien”, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan 4.1 : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih (*clean goverment*).

Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan 4.2 : Meningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sasaran 4.2.1 : Meningkatnya akuntabilatas kinerja pemerintah daerah.

Tujuan 4.3 : Meningkatkan pelayanan pemerintahan yang baik.

Sasaran 4.3.1 : Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur.

Untuk menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, BAPPEDA bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang pada RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu, bertujuan meningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan sasaran meningkatnya akuntabilatas kinerja pemerintah daerah.

BAPPEDA yang visioner didukung oleh banyak variabel, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari:

a. Adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
b. Adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
c. Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d. Integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan baik nasional, provinsi dan kabupaten.

Kualitas perencanaan BAPPEDA sebagai lembaga perencana, harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. **Aspiratif** artinya dalam penyusunannya keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan menjadi suatu keniscayaan.
2. **Aplikatif** artinya produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi OPD maupun pemangku kepentingan lainnya

Pemantapan fungsi dan peran perencanaan pembangunan ke depan harus melalui upaya-upaya yang lebih cerdas dan terarah serta terukur. Peningkatan akselerasi pembangunan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat ditunjang dengan adanya potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta semangat kebersamaan dan tanggung jawab dari seluruh aparatur BAPPEDA. Sehingga tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA dalam mendukung rencana pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat terealisasi dengan maksimal. Adapun tujuan dan sasaran BAPPEDA sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL 7 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan BAPPEDA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Akhir Tahun	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan yang aspiratif	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan tahunan	40	45	50	55	55	60
		Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah	70	5	85	95	100	100
			Tingkat keselarasan rencana pembangunan kabupaten dengan provinsi dan nasional	N/A	N/A	70	75	80	85
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai evaluasi SAKIP daerah	D	B	BB	BB	A	A
3	Meningkatkan pelayanan pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	78	80	85	90	90
			Persentase penetapan dokumen perencanaan tepat waktu	60	70	80	90	100	100
4	Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang implementati	Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitiandan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil Kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan	N/A	N/A	50	55	60	65

Tujuan dan sasaran ini merupakan turunan yang integral dari misi Bupati Kepulauan Meranti, pada misi ke-4 yaitu "*Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Bersih, Efektif dan Efisien*".

2.2. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti mengampu urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah. Berdasar urusan dan program yang diampu, indikator kinerja utama BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 adalah:

TABEL 8 Indikator kinerja utama BAPPEDA Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
1	Meningkatkan perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan yang aspiratif	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan tahunan	60
		Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah	100
			Tingkat keselarasan rencana pembangunan kabupaten dengan provinsi dan nasional	85
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai evaluasi SAKIP daerah	A
3	Meningkatkan pelayanan pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
			Persentase penetapan dokumen perencanaan tepat waktu	100
4	Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang implementasi	Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil Kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan	65

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja sasaran strategis yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indicator lain yang relevan. Perjanjian kinerja disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan serta mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja. Adapun indikator kinerja sasaran strategis yang termuat dalam perubahan perjanjian kinerja BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021 pada tataran Eselon II (Kepala BAPPEDA) adalah sebagai berikut:

TABEL 9 Perjanjian kinerja BAPPEDA Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
1	Tersusunnya dokumen perencanaan yang aspiratif	1. Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan tahunan	60
2	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	2. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah	100
		3. Tingkat keselarasan rencana pembangunan kabupaten dengan provinsi dan nasiona	85
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	4. Nilai evaluasi SAKIP daerah	A
4	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		6. Persentase penetapan dokumen perencanaan tepat waktu	100
5	Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitiandan pengembangan dalam pembangunan daerah	7. Persentase hasil Kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan	65

Untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan, berdasarkan perubahan Renja Tahun 2021 program berserta pagu dana yang digunakankan antara lain:

TABEL 10. Program dan Alokasi Dana BAPPEDA Tahun 2021

No	Program		Pagu Dana
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	5.754.807.665
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	258.055.150
3.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	2.628.124.550
4.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	1.561.082.180
5.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.	787.561.720
TOTAL		**Rp.**	**10.989.631.265**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

TABEL 11. Kode warna persentase capaian target kinerja instansi pemerinta**h**

Persenase	Predikat	Kode Warna
< 100 %	Tidak Mencapai Target	
= 100%	Sesuai Target	
> 100 %	Melebihi/ Melampaui Target	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

TABEL 12. Kode warna realisasi capaian kinerja di bawah 100%

No	Kategori	Rata-Rata Capaian	Kode Warna
1	Sangat baik	> 90.00	
2	Baik	75.00 – 80.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	

4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja diperoleh melalui pengukuran kinerja yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan serta akuntabilitas organisasi, dengan melakukan klarifikasi terhadap capaian target untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target).

Adapun capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021 didapatkan melalui pengukuran terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dari hasil pengukuran kinerja selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian target indikator kinerja BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Realiasi}{Target}\ x\ 100\ \%$$

b. Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Target - (Realiasi - Target)}{Target}\ x\ 100\ \%$$

Selanjutnya capaian kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja tersebut dikelompokkan dalam skala nilai peringkat capaian kinerja, dengan mengadopsi peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 sebagaimana yang telah dijanjikan pada Perjanjian Kinerja disajikan pada tabel di bawah ini:

TABEL 13. Capaian kinerja utama BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan tahunan	%	60	85.04	141.73
2	Tingkat keselarasan dokumen	%	100	100	100.00

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	perencanaan daerah				
3	Tingkat keselarasan rencana pembangunan kabupaten dengan provinsi dan nasional	%	85	100	117.65
4	Nilai evaluasi SAKIP daerah	Kategori	A	N/A	-
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90.00	85.79	95.32
6	Persentase penetapan dokumen perencanaan tepat waktu	%	100		
7	Persentase hasil Kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan	%	65	75	115.38

Dari Tabel 10 dapat diketahui nilai capaian kinerja indikator utama yang capaian kinerjanya melebihi/melampaui target sebanyak 4 indikator, 1 indikator mencapai target dan 1 indikator lainnya tidak mencapai target dan 1 indikator belum menerima hasil.

3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

3.3.1. Tersusunnya dokumen perencanaan yang aspiratif

Fungsi penting dalam perencanaan pembangunan adalah untuk mempengaruhi, memberikan arah dan dalam beberapa hal diharapkan mampu mengendalikan perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pada kurun waktu tertentu. Di era otonomi daerah dan semangat reformasi, perencanaan pembangunan yang baik seharusnya beranjak dari realistas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta harus aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan pendekatan yang bersifat aspiratif biasa dikenal dengan istilah *bottom up planning*. Wujud nyata dari pelaksanan perencanaan aspiratif dan partisipatif adalah pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) baik pada tingkatan desa (tidak dilaksanakan lagi berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017), Musrenbang kecamatan hingga Musrenbang RKPD (Kabupaten).

Indikator untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat yang ditandai dengan tersusunnya dokumen perencanaan yang aspiratif dapat dilihat daripersentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan tahunan. Formulasi pengukuran yakni:

$$\frac{Jumlah\ usulan\ yang\ diakomodir\ dalam\ dokumen\ perencanaan\ tahunan}{Jumlah\ seluruh\ usulan\ kegiatan}\ x\ 100\%$$

Untuk mencapai target kinerja yang dijanjikan, dicapai melalui 1 (satu) program dengan 3 (tiga) kegiatan yakni:

- Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah:
  - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
  - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil musrenbang desa/kecamatan yang dilaksanakan, usulan kegiatan dari masyarakat yang masuk sebanyak 199 program dan 234 kegiatan usulan. Setelah dilaksanakan rapat-rapat koordinisi bidang dan usulan pokok-pokok pikiran DPRD.

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan tahunan sebesar 85,04% dengan persentase capaian sebesar 141,73% atau melebih target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra, maka kinerja pada indikator ini dikategorikan sangat baik. Adapun analisis pencapaian sasaran tersusunnya dokumen perencanaan yang aspiratif sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

TABEL 11. Analisis Pencapaian Tersusunnya Dokumen Perencanaan Yang Aspiratif

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2021	
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	%
1	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan tahunan	%	55	69.09	125.61	60	85.04	141.73	60	141.73
Rata-Rata Capaian Kinerja			**55**	**69.09**	**125.61**	**60**	**85.04**	**141.73**	**60**	**141.73**

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran tersusunnya dokumen perencanaan yang aspiratif dengan realisasi penggunaan anggaran terlihat pada tabel berikut:

TABEL 15. Tingkat Efektifitas Dan Efisiensi Kinerja Sasaran Tersusunnya Dokumen Perencanaan Yang Aspiratif

No	Indikator	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%

1	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan tahunan	%	60	85.04	141.73	Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2,628,124,550	1,617,079,000	61.53
Rata-Rata Capaian Kinerja					**141.73**	**Rata-Rata Kinerja Keuangan**			**61.53**
Tingkat Efisiensi									**80.20**
Tingkat Efektifitas									**230%**

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran disebabkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Telah terbangunnya sistem *e-planning* Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Terlaksananya tahapan-tahapan waktu pelaksanaan penyusunan RKPD dengan baik;
3. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang semakin baik;
4. Keterbatasan APBD juga menjadi faktor pembatas jumlah usulan masyarakat yang diakomodir.
5. Masih adanya kesalahan dalam pengusulan kegiatan yang mengakibatkan usulan tidak dapat diakomodir.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang diberikan rekomendasikan solusi sebagai berikut :

1. Pengembangan aplikasi *e-planning* yang lebih *user friendly* dan mensosialisasikan tata cara pengusulan rencana kerja perangkat daerah maupun desa sehingga dapat memperkecil tingkat kesalahan;
2. Menyusun strategi untuk memperoleh dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang lebih besar dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah serta pendapatan lainnya, seperti dana CSR;

3.3.2. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Penyelarasan perencanaan pembangunan merupakan suatu hal yang kompleks. Perencanaan saat ini bukan hanya merupakan aktivitas manajemen semata, tetapi juga merupaka proses politik yang didalamnya melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan rencana pembangunan daerah dapat dipahami sebagai sejauh mana tingkat rencana pembangunan daerah dari unit/tingkat pemerintahan lebih rendah merupakan satu kesatuan dari dan disusun mengacu rencana pembangunan dari unit/tingkat pemerintah yang lebih tinggi. Pada konteks

ini keselarasan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan dua indikator kinerja sasaran yakni:

a. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah: Keselarasan yang dimaksud adalah keselarasan antara RPJMD-Renstra PD-RKPD-Renja PD. Dimana formulasi penghitungannya yakni:

$$X = \frac{X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7}{7} x\ 100\%$$

$$X1 = \frac{Jumlah\ sasaran\ RPJMD\ yang\ menjadi\ sasaran\ dalam\ Renstra\ PD}{Jumlah\ seluruh\ sasaran\ RPJMD} x\ 100\%$$

$$X2 = \frac{Jumlah\ indikator\ sasaran\ RPJMD\ yang\ menjadi\ indikator\ sasaran\ dalam\ Renstra\ PD}{Jumlah\ seluruh\ indikator\ sasaran\ RPJMD} x\ 100\%$$

$$X3 = \frac{Jumlah\ program\ pada\ Renstra\ PD\ yang\ sesuai\ RPJMD}{Jumlah\ seluruh\ program\ Renstra\ PD} x\ 100\%$$

$$X4 = \frac{Jumlah\ sasaran\ dalam\ RKPD\ yang\ sesuai\ RPJMD}{Jumlah\ seluruh\ sasaran\ RKPD} x\ 100\%$$

$$X5 = \frac{Jumlah\ program\ dalam\ RKPD\ yang\ sesuai\ RPJMD}{Jumlah\ seluruh\ program\ RKPD} x\ 100\%$$

$$X6 = \frac{Jumlah\ program\ pada\ Renja\ PD\ yang\ sesuai\ dengan\ program\ Renstra\ PD}{Jumlah\ seluruh\ program\ pada\ Renja\ PD} x\ 100\%$$

b. Tingkat keselarasan rencana pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional; Keselarasan yang dimaksud adalah

keselarasan antara RPJMD Kabupaten – RPJMD Provinsi – Renstra Kementerian/ Lembaga – RPJMN. Formulasi penghitungannya yakni:

$$X = \frac{X1 + X2}{2} x\ 100\%$$

$$X1 = \frac{Jumlah\ prioritas\ pembangunan\ kabupaten\ yang\ selaras\ prioritas\ pembangunan\ provinsi}{Jumlah\ seluruh\ prioritas\ pembangunan\ kabupaten} x\ 100\%$$

$$X2 = \frac{Jumlah\ prioritas\ pembangunan\ kabupaten\ yang\ selaras\ prioritas\ pembangunan\ nasional}{Jumlah\ seluruh\ prioritas\ pembangunan\ kabupaten} x\ 100\%$$

1. Prioritas pembangunan nasional tahun 2021 berjumlah 7 (tujuh) prioritas yakni:
   a. Ketahanan ekonomi, untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
   b. Pengembangan wilayah, untuk mengurangi kesenjangan ;
   c. Sumber daya manusia, yang berkualitas dan berdaya saing;
   d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
   e. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;

f. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
g. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

2. Prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2021 berjumlah 5 (lima) prioritas yakni:
   a. Pengembangan industri;
   b. Pengembangan pertanian;
   c. Pengembangan pariwisata;
   d. Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
   e. Pengembangan SDM yang beriman, berkualitas dan berdaya saing.

3. Prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 berjumlah 5 (lima) prioritas yakni:

   a. Optimalisasi penanganan pandemic Covid-19 serta dampak social dan ekonominya masyarakat
   b. Penguatan pengelolaan sector perkebunan, pertanian, perikanan dan parawisata untuk membukalapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah produk;
   c. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
   d. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar
   e. Meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan public yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan Teknologi (e-Govermment).

Untuk mencapai target kinerja yang dijanjikan dapat dicapai melalui 2 (dua) program dengan 4 (empat) kegiatan yakni:

- Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah:
  - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
  - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah:
  - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan persentase keselarasan dokumen perencanaan rata-rata sebesar 117.65% atau melebih dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra, maka kinerja pada indikator ini dikategorikan sangat baik. Adapun analisis pencapaian sasaran sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

TABEL 12. Analisis pencapaian terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2021	
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	%
1	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat keselarasan rencana pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional	%	80	91.61	114.5	85	100	117.65	85	100
Rata-Rata Capaian Kinerja			**90.00**	**95.81**	**107.26**	**95**	**100.00**	**108.82**	**92.50**	**100.00**

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran tersusunnya dokumen perencanaan yang aspiratif dengan realisasi penggunaan anggaran terlihat pada tabel berikut:

TABEL 17. Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

No	Indikator	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah	%	100	100	100	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1,561,082,180	815,141,094	52.22
2	Tingkat keselarasan rencana pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional	%	85	100	117.65				
Rata-Rata Capaian Kinerja					**108.82**	**Rata-Rata Kinerja Keuangan**			**52.22**
Tingkat Efisiensi									**56.61**
Tingkat Efektifitas									**208%**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran ini berada pada kategori melampaui target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung tercapainya sasaran ini adalah:

a. Telah terbangunnya aplikasi *e-planning* Kabupaten Kepulauan Meranti;
b. Telah terbangunnya integrasi dan pemahaman ASN perencana yang baik terhadap aplikasi DAK Krisna (sistem terintegrasi berbasis elektronik*);*
b. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya peran serta perangkat daerah yang semakin aktif.
c. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.

3.3.3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Hal ini menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yakni:

- Akuntabilitas kejujuran/ akuntabilitas hokum yakni penghindaran penyalahgunaan jabatan serta jaminan kepatuhan terhadap hokum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumberdana publik.
- Akuntabilitas proses yakni prosedur dalam melaksanakan tugas sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, manajemen dan prosedur administrasi.
- Akuntabilitas program yakni pertimbangan terhadap pelaksanaan tujuan yang ditetapkan bisa tercapai atau tidak/ alternative program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.
- Akuntabilitas kebijakan yakni pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap kebiijakan-kebijakan yang diambil kepada DPRD dan masyarakat.

Indikator untuk mengetahui akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diukur berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015. Semakin tinggi nilai AKIP dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka semakin baik kinerja akuntabilitas pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja terdiri atas 5 komponen yakni: Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), dan Capaian Kinerja (20%). Akumulasi dari penilaian terhadap 5 komponen ini nantinya menjadi dasar dalam penilaian bobot akuntabiltas kinerja pemerintah daerah.

TABEL 13. Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 - 100	**Sangat Memuaskan**
2	A	>80 – 90	**Memuaskan,** memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	**Sangat Baik,** Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60 – 70	**Baik,** Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	**Cukup**(memadai), Akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang data digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30 – 50	**Kurang**, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	**Sangat Kurang**, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan; sebagaian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber: Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015

Untuk mencapai target kinerja yang di janjikan, dicapai melalui 2 (dua) program dengan 3 (tiga) kegiatan yakni:

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota:
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Capian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah:
  - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

Berdasarkan hasil penilaian SAKIP OPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021, SAKIP BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan nilai sebesar 81.23 (Kategori A) sedangkan untuk Nilai SAKIP Kabupaten Kepulauan Meranti belum dapat ditentukan karena hasil penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapatkan belum diterbitkan. Adapun rincian nilainya yakni:

TABEL 19. Hasil evaluasi SAKIP BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,98	23,06
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,64	16, 16
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,6	10,37
d.	Evaluasi Internal	10	6, 11	6,76
e.	Capaian Kinerja	20	12, 13	11,7
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**67,46**	**68,05**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai hasil evaluasi SAKIP BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan capaian kinerja akuntabilitas kabupaten belum dapat ditetapkan sebagaimana terlihat pada Tabel 17, sementara itu tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan realisasi penggunaan anggaran belum dapat dihitung seperti terlihat pada Tabel 18.

TABEL 20 Analisis pencapaian meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021	
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	%
1	Nilai Evaluasi SAKIP Daerah	Kategori	A	67.46	-	A	68.05	-	A	-
Rata-Rata Capaian Kinerja			**95**		**-**	**95**		**-**	**-**	**-**

TABEL 21 Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

No	Indikator	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	Nilai Evaluasi SAKIP Daerah	Kategori	A	68.05	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	404,681,065	279,371,265	69.03
						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	469,738,365	283,327,550	60.32
Rata-Rata Capaian Kinerja					**-**	**Rata-Rata Kinerja Keuangan**			**64.68**
Tingkat Efisiensi									**-**
Tingkat Efektifitas									**-**

Selama tahun 2021 kepala daerah bersama Tim SAKIP kabupaten dan Tim SAKIP OPD terus melaksanakan perbaikan-perbaikan komponen-komponen penilaian SAKIP kabupaten. Beberapa langkah yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan nilai SAKIP kabupaten antara lain:

- Pelibatan peran serta kepala daerah dalam pelaksanaan SAKIP berupa: penguatan dan arahan bupati terkait SAKIP serta penyusunan pohon kinerja bersama Wakil Bupati;
- Perbaikan kualitas dokumen perencanaan: melalui peningkatan keselarasan dokumen perencanaan, menerapkan perencanaan terintegrasi (*cross cutting*), *refocusing* dan efisiensi program dan kegaitan;
- Peningkatan kapasitas dan sinergisitas Tim SAKIP OPD dan kabupaten dengan pelaksanaan Asistensi SAKIP dengan Kementerian PAN-RB serta Asistensi SAKIP OPD oleh Tim SAKIP kabupaten;
- Peningkatan kualitas evaluasi internal dengan pelatihan kantor sendiri oleh Tim Kementerian PAN-RB serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian program secara berkala;
- Membangun aplikasi serta optimalisasi *E-SAKIP* Kabupaten Kepulauan Meranti. Optimalisasi yang dilaksanakan diantaranya: kelengkapan item yang dipublikasi sesuai standar Kementerian PAN-RB, sinkronisasi SKP dan IKI serta penggunaan aplikasi sebagai media pengukuran kinerja dan monitoring dan evaluasi kinerja.

3.3.4. Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur

Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yakni kinerja pegawai (per individu) dan kinerja organiasasi. Kinerja merupakan aspek penting keberhasilan suatu organiasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayananan publik.

Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur di kantor BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat dari dua indikator yakni:

- **Indeks Kepuasan Masyarakat**: Pengukurannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

- **Persentase penetapan dokumen perencanaan tepat waktu**; Penetapan dokumen perencanaan tepat waktu menjadi indikator penting dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, dengan penetapan dokumen tepat waktu pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Pada tahun 2021 ada 2 dokumen perencanaan yang disusun yakni dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 serta dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2021.

Untuk mencapai target kinerja yang dijanjikan, dicapai melalui 4 (empat) program dengan 6 (enam) kegiatan yakni:

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota:
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah:
  - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan capaian kinerja meningkatnya kinerja pelayanan aparatur sebesar **69,09**% atau tidak mencapai target yang ditetapkan. Untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat capaian kinerja sebesar **95.32**% dan untuk indikator persentase penetapan dokumen perencanaan tepat waktu tercapai sebesar **42,86**%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra, maka kinerja pelayanan aparatur BAPPEDA masih dikategorikan baik. Adapun analisis pencapaian sasaran sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

TABEL 142. Analisis pencapaian meningkatnya kinerja pelayanan aparatur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2021	
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90	91,63	101,8	90	85,79	95,32	90	95,32
2	Persentase penetapan dokumen perencanaan tepat waktu	%	100	85,71	85,71	100	42,86	42,86	100	42,86
Rata-Rata Capaian Kinerja			**95**	**88,67**	**93,76**	**95**	**88,67**	**69,09**	**95,82**	**69,09**

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja pelayanan aparatur dan realisasi penggunaan anggaran terlihat pada tabel berikut:

TABEL 23. Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran meningkatnya kinerja pelayanan aparatur

No	Indikator	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	Indeks kepuasan masyarakat	%	90	85,79	95,32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.380.126.600	4.448.793.841	82,69
2	Persentase penetapan dokumen perencanaan tepat waktu	%	100	42,86	42,86	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	287.035.895	196.299.200	68,39
Rata-Rata Capaian Kinerja					**69,09**	**Rata-Rata Kinerja Keuangan**			**75,54**
Tingkat Efisiensi									**-6,45**
Tingkat Efektifitas									**0,91**

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran disebabkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum adanya kejelasan petugas yang melayani, persyaratan pelayanan, ketepatan waktu pelayanan serta kecapatan pelayanan (perhitungan IKM terlampir) dan survey IKM dilaksanakan secara elektronik;
2. Sudah adanya intgrasi aplikasi E-*Planning* untuk perencanaan dan E-SAKIP untuk evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan E-*Budgeting* lebih meningkatkan kemudahan dalam menjaga ketelitian, keakuratan, dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan;
3. Keterlambatan penetapan RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021, sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diakibatkan beberapa hal, yaitu :

(a) Adanya proses pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Proses tersebut cukup rumit dan memakan waktu yang lama yang dengan diterbitkannya hasil pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 20 pada minggu ke dua bulan Oktober 2020. Terhadap hasil pemutakhiran itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan penyesuaian hasil pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya;

(b) Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 baru ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2020 melalui Permendagri 40 Tahun 2020.

4. pengumpulan renja perangkat daerah seringkali mengakibatkan ASN di BAPPEDA menambah jam kerja (lembur) untuk mengejar penyelesaian dokumen agar bisa ditetapkan tepat waktu.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang diberikan rekomendasikan solusi sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu dalam upaya pelayanan survey berbasis elektronik dalam proses pelaksanaan survey IKM;
2. Evaluasi dan perbaikan SOP untuk pelayanan publik di BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti serta penetapan staf yang bertugas dalam melakukan survey serta pelayanan dan pengaduan.
3. Mengintegrasikan aplikasi E-plannig, E-Budgeting dan E-SAKIP dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.3.5. Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

Kualitas perencanaan yang baik merupakan keniscayaan bila tidak didukung dengan adanya data dan informasi yang baik pula. Salah satu bentuk data dan informasi adalah ketersediaan data hasil kajian/ penelitian. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang, sehingga perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi atau peramalan (*forecasting*). Tidak mungkin proyeksi atau peramalan akan tepat apabila dalam prosesnya tidak didukung dengan data dan informasi yang valid dan akurat.

Indikator untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembanguanan daerah dapat dilihat daripersentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan. Formulasi pengukurannya yakni:

$$\frac{Jumlah\ Kajian\ yang\ di\ manfaatkan}{Jumlah\ seluruh\ kajian} x\ 100\%$$

Untuk mencapai target kinerja yang di janjikan, dicapai melalui 1 (satu) program dengan 3 (tiga) kegiatan yakni:

1 Program penelitian dan pengembangan daerah:
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.
- Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pada tahun berjalan persentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan mencapai 75% atau melebih dari target yang ditetaplan. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra, maka kinerja pada indikator ini dikategorikan sangat baik. Adapun analisis pencapaian sasaran tersaji pada tabel di bawah ini:

TABEL 15. Analisis pencapaian meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2021	
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	%
1	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan	%	60	75	125	65	75	115.38	65	115.38
Rata-Rata Capaian Kinerja			**60**	**75**	**125**	**65**	**75**	**115.38**	**65**	**115.38**

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran tersusunnya dokumen perencanaan yang aspiratif dengan realisasi penggunaan anggaran terlihat pada tabel berikut:

TABEL 16. Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

No	Indikator	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan	%	65	75	115.38	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	20,892,000	16,156,000	77.33
Rata-Rata Capaian Kinerja					115.38	Rata-Rata Kinerja Keuangan			77.33
Tingkat Efisiensi									38.05
Tingkat Efektifitas									149.21

Keberhasilan yang di dapat dalam pencapaian kinerja sasaran disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Adanya bidang penelitian dan pengembangan yang berkedudukan di BAPPEDA sehingga memudahkan koordinasi terkait kebutuhan data kajian yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan;
2. Kerjasama yang baik dengan badan pusat statistik daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang diberikan rekomendasikan solusi sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten dan R*oad map* Sistem Informasi Inovasi Daerah (SINOVDA) sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan kajian, penelitan dan pengembangan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 3 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Total anggaran pada Perubahan BAPPEDA sebesar Rp **10.989.631.265**,- terdiri atas belanja operasi Rp 10.708.224.641,- (97.43%) dan belanja modal sebesar Rp 281.406.624,- (2.57%). Pada tahun 2021, dengan realisasi anggaran mencapai Rp **7.756.584.079**,- terdiri atas

belanja operasi Rp 7.671.062.255,- (98.89%) dan belanja modal sebesar Rp 85.521.824,- (1.11%) atau sebesar (70.58%). Secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini:

TABEL 17. Akuntabilatas keuangan BAPPEDA Tahun 2021.

No	Nama Kegiatan	APBD Murni	APBDP	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
1	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**490,244,165**	**582,762,315**	**350,800,091**	**60.20**	**231,962,224**
A	**SEKRETARIAT DAERAH**	**490,244,165**	**582,762,315**	**350,800,091**	**60.20**	**231,962,224**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**290,259,715**	**324,707,165**	**209,142,765**	**64.41**	**115,564,400**
1.1	**Penataan Organisasi**	**290,259,715**	**324,707,165**	**209,142,765**	**64.41**	**115,564,400**
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	290,259,715	324,707,165	209,142,765	64.41	115,564,400
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**199,984,450**	**258,055,150**	**141,657,326**	**54.89**	**116,397,824**
2.1	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**199,984,450**	**258,055,150**	**141,657,326**	**54.89**	**116,397,824**
2.2.1	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	199,984,450	258,055,150	141,657,326	54.89	116,397,824
2	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**16,307,328,737**	**10,406,868,950**	**7,405,783,988**	**71.16**	**3,001,084,962**
A	**PERENCANAAN**	**15,449,925,207**	**9,619,307,230**	**6,951,242,435**	**72.26**	**2,668,064,795**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10,903,933,440**	**5,430,100,500**	**4,519,022,341**	**83.22**	**911,078,159**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**79,973,900**	**79,973,900**	**70,228,500**	**87.81**	**9,745,400**
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	79,973,900	79,973,900	70,228,500	87.81	9,745,400
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8,948,789,250**	**3,588,802,934**	**3,322,048,905**	**92.57**	**266,754,029**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	8,948,789,250	3,588,802,934	3,322,048,905	92.57	266,754,029

No	Nama Kegiatan	APBD Murni	APBDP	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**966,278,261**	**901,623,951**	**588,149,822**	**65.23**	**313,474,129**
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	23,049,670	23,049,670	23,049,670	100.00	-
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	184,315,781	202,010,381	193,926,728	96.00	8,083,653
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	29,997,110	25,311,000	24,780,000	97.90	531,000
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	47,343,900	17,973,900	17,973,900	100.00	-
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	54,898,800	24,500,000	20,804,000	84.91	3,696,000
1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	99,750,000	59,130,000	52,785,000	89.27	6,345,000
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	526,923,000	549,649,000	254,830,524	46.36	294,818,476
1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**195,322,524**	**142,982,824**	**76,362,824**	**53.41**	**66,620,000**
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	175,598,700	123,259,000	56,639,000	45.95	66,620,000
1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	19,723,824	19,723,824	19,723,824	100.00	-
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**440,519,135**	**415,140,335**	**330,407,826**	**79.59**	**84,732,509**
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	7,799,000	11,000,000	11,000,000	100.00	-

No	Nama Kegiatan	APBD Murni	APBDP	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	130,320,135	130,320,135	85,707,826	65.77	44,612,309
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	302,400,000	273,820,200	233,700,000	85.35	40,120,200
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**273,050,370**	**301,576,556**	**131,824,464**	**43.71**	**169,752,092**
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	5,848,500	6,785,500	6,395,000	94.25	390,500
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	124,999,439	147,588,625	80,197,800	54.34	67,390,825
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	142,202,431	147,202,431	45,231,664	30.73	101,970,767
2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**3,036,037,910**	**2,628,124,550**	**1,617,079,000**	**61.53**	**1,011,045,550**
2.1	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**1,350,377,960**	**1,350,148,300**	**962,663,700**	**71.30**	**387,484,600**
2.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	358,686,200	358,686,200	348,418,200	97.14	10,268,000
2.1.2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	147,965,000	177,375,000	102,855,450	57.99	74,519,550
2.1.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	60,402,500	22,250,000	16,250,000	73.03	6,000,000

No	Nama Kegiatan	APBD Murni	APBDP	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
2.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	82,212,750	60,621,000	46,721,000	77.07	13,900,000
2.1.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	327,895,510	235,066,100	208,357,700	88.64	26,708,400
2.1.6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	373,216,000	496,150,000	240,061,350	48.38	256,088,650
2.3	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1,215,921,250**	**808,237,885**	**371,087,750**	**45.91**	**437,150,135**
2.3.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	366,265,150	352,579,190	144,798,950	41.07	207,780,240
2.3.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	249,922,800	287,035,895	196,299,200	68.39	90,736,695
2.3.3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	599,733,300	168,622,800	29,989,600	17.79	138,633,200
2.4	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**469,738,700**	**469,738,365**	**283,327,550**	**60.32**	**186,410,815**
2.4.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	123,500,600	123,500,600	89,371,600	72.37	34,129,000
2.4.2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	74,997,150	74,997,150	12,337,500	16.45	62,659,650
2.4.3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	271,240,950	271,240,615	181,618,450	66.96	89,622,165

No	Nama Kegiatan	APBD Murni	APBDP	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**1,509,953,857**	**1,561,082,180**	**815,141,094**	**52.22**	**745,941,086**
3.1	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**599,953,857**	**958,678,180**	**557,445,098**	**58.15**	**401,233,082**
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	41,992,950	102,499,850	59,647,750	**58.19**	42,852,100
3.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	42,558,950	92,499,600	48,092,950	**51.99**	44,406,650
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	39,998,630	78,498,580	42,678,355	**54.37**	35,820,225
3.1.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	93,171,750	125,669,800	85,696,700	**68.19**	39,973,100
3.1.5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	53,282,920	92,498,730	45,261,511	**48.93**	47,237,219
3.1.6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	79,353,910	112,498,640	80,865,976	**71.88**	31,632,664
3.1.7	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	249,594,747	354,512,980	195,201,856	**55.06**	159,311,124

No	Nama Kegiatan	APBD Murni	APBDP	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
3.2	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**632,912,000**	**357,544,300**	**132,187,218**	**36.97**	**225,357,082.00**
3.2.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	230,653,000	218,676,600	73,439,268	**33.58**	145,237,332.00
3.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	402,259,000	138,867,700	58,747,950	**42.30**	80,119,750.00
3.3	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**277,088,000**	**244,859,700**	**125,508,778**	**51.26**	**119,350,922**
3.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	277,088,000	244,859,700	125,508,778	**51.26**	119,350,922
B	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**857,403,530**	**787,561,720**	**454,541,553**	**57.72**	**333,020,167**
4	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**857,403,530**	**787,561,720**	**454,541,553**	**57.72**	**333,020,167**
4.1	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**284,699,950**	**20,892,000**	**16,156,000**	**77.33**	**4,736,000**
4.1.1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	284,699,950	20,892,000	16,156,000	**77.33**	4,736,000
4.2	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**572,703,580**	**766,669,720**	**438,385,553**	**57.18**	**328,284,167**
4.2.1	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	211,873,000	222,258,000	182,573,000	**82.14**	39,685,000
4.2.2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	197,280,700	330,955,440	153,874,853	**46.49**	177,080,587
4.2.3	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	163,549,880	213,456,280	101,937,700	**47.76**	111,518,580

No	Nama Kegiatan	APBD Murni	APBDP	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
		16,797,572,902	**10,989,631,265**	**7,756,584,079**	**70.58**	**3,233,047,186**

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 ini berisikan informasi-informasi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti. Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran
   - Terdapat 3 tujuan dari 5 tujuan BAPPEDA dengan 4 indikator sasaran yang realisasinya mencapai bahkan melebihi target dan memiliki predikat capaian sangat baik;
   - Terdapat 1 tujuan dari 5 tujuan dengan 1 indikator sasaran yang realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan dengan realiasi capaian kinerja sangat baik;
   - Terdapat 1 tujuan dari 5 tujuan dengan 1 indikator sasaran yang realisasinya tidak dapat dihitung, karena menunggu hasil penilaian Kementerian PAN-RB diterbitkan.

b. Realisasi dan Capaian Keuangan

   Pada perubahan anggaran BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021, dukungan anggaran yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegaitan operasional kantor sebesar Rp 10.989.631.265,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. Rp 7.756.584.079,- atau sebesar 70.58%. Angaran tersebut terdiri dari:

1. Belanja operasi sebesar Rp. **10.708.224.641,-** dengan realisasi sebesar Rp. **7.671.062.255,-** (71.63%);
2. Belanja Modal sebesar Rp. **281.406.624,-** dengan realisasi sebesar Rp. **85.521.824,-** (30.39%).

Berdasarkan persandingan antara persentase pencapaian kinerja dan persentasi realiasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran di BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 sudah cukup efisien. Kemudian dengan mencermati seluruh analisis yang ada, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup optimal. Selanjutnya capaian yang sudah baik tersebut perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

Sebagai penutup, LKjIP BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta motivasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.

Selatpanjang, 22 Januari 2022
Plt. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kepulauan Meranti,

M. SAKINUL WADI, S.H.I
PPenata TK I / III d
NIP. 19800823 201102 1 001

DATA EVIDEN **(1)**

INDIKATOR PERSENTASE USULAN KEGIATAN YANG DIAKOMODIR DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

FORMULASI PENGHITUNGAN

$$\frac{Jumlah\ usulan\ yang\ diakomodir\ dalam\ dokumen\ perencanaan\ tahunan}{Jumlah\ seluruh\ usulan\ kegiatan} x100\%$$

$$\frac{199}{234} x100\% = 85.042\%$$

MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN
MUSRENBANG

Rekap Program dan Kegiatan Tahapan Rancangan Awal Tahun Perencanaan 2022
Kabupaten Kepulauan Meranti - Provinsi Riau

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
1	**1.01.2.22.0.00.01**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**8**	**20**	**88**
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	4	42
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	1	2
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	1	2
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	3	8
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	1	3
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	1	3
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	2	5
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	23
2	**1.02.0.00.0.00.01**	**Dinas Kesehatan**	**5**	**24**	**93**
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	3	47
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	3	5
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	6	6
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	3	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	9	32
3	**1.02.0.00.0.00.02**	**Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)**	**3**	**9**	**19**
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	2	8
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	1	1
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	10
4	**1.03.1.04.0.00.01**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**15**	**30**	**85**
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	2	14
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	1	10
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	1	1

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	1	4
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	1	4
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	1	1
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	1	1
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	1	10
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	1	1
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	3	4
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	4	7
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	3	5
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	1	1
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	1	2
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	8	20
5	**1.05.0.00.0.00.01**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**3**	**8**	**17**
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	1	1
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	1	2
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	14
6	**1.05.0.00.0.00.02**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**2**	**10**	**31**
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	3	11
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	20
7	**1.06.2.08.2.14.01**	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**15**	**32**	**76**
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	3	8
	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	1	1
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	2	4
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	2	7
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	2	6
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	1	3

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	3	5
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	1	1
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	1	1
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	1	1
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	2	3
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	1	2
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	3	12
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	2	8
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	14
8	**2.09.3.27.0.00.01**	**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan**	**9**	**21**	**51**
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	3	8
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	1	1
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	1	1
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	3	5
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	2	6
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	3	5
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	1	2
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	1	4
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	19
9	**2.11.0.00.0.00.01**	**Dinas Lingkungan Hidup**	**10**	**18**	**45**
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	1	1
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	2	4
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	1	4
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	1	1

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	1	3
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	1	1
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	1	1
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	1	2
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	8	25
10	**2.12.0.00.0.00.01**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**5**	**14**	**38**
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	2	4
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	2	4
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	2	4
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	1	2
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	24
11	**2.13.0.00.0.00.01**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**5**	**11**	**47**
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	-	1	4
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	-	1	3
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	1	9
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	1	9
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	22
12	**2.15.0.00.0.00.01**	**Dinas Perhubungan**	**3**	**6**	**10**
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	1	1
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	2	4
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	3	5
13	**2.18.2.07.0.00.01**	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**	**7**	**14**	**31**
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	2	3
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	1	1
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	1	1

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	1	1
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	1	3
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	19
14	**2.23.2.24.0.00.01**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**3**	**12**	**29**
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	2	5
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	3	5
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	19
15	**3.25.2.20.0.00.01**	**Dinas Perikanan**	**3**	**10**	**27**
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	2	4
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	3	6
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	5	17
16	**3.26.2.19.0.00.01**	**Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**6**	**17**	**57**
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	2	10
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	4	5
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	4	19
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	1	4
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	5	16
17	**3.30.3.31.2.17.01**	**Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah**	**14**	**23**	**57**
	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	1	1
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	1	2
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	1	2
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	1	1
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	1	1
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	1	5
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	1	1
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	2	3

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	1	3
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	1	1
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	1	6
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	-	1	2
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	9	26
18	**3.27.0.00.0.00.01**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**	**5**	**13**	**38**
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	2	3
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	2	5
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	1	4
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	1	5
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	21
19	**6.01.0.00.0.00.01**	**Inspektorat Daerah**	**3**	**11**	**35**
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	2	6
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	2	5
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	24
20	**5.01.5.05.4.01.01**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**4**	**16**	**51**
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	3	13
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	3	11
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	3	6
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	21
21	**5.02.0.00.0.00.01**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**3**	**14**	**38**
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	5	18
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	1	4
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	8	16
22	**5.02.0.00.0.00.02**	**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**	**2**	**8**	**40**

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	1	14
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	26
23	**5.03.0.00.0.00.01**	**Badan Kepegawaian Daerah**	**3**	**11**	**42**
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	4	17
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	1	1
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	24
24	**4.01.2.16.5.06.01**	**Sekretariat Daerah**	**8**	**24**	**79**
	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	1	7
	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	-	2	7
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	1	3
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	1	3
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	2	6
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	4	9
	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	-	2	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	11	41
25	**4.02.0.00.0.00.01**	**Sekretariat DPRD**	**2**	**14**	**38**
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	6	15
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	8	23
26	**8.01.0.00.0.00.01**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**	**6**	**12**	**30**
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	1	2
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	1	2
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	1	3
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	1	2
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	18

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
27	**7.01.4.01.0.00.01**	**Kecamatan Tebing Tinggi**	**5**	**15**	**39**
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	3	3
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	3	4
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	28
28	**7.01.4.01.0.00.02**	**Kecamatan Tebing Tinggi Barat**	**5**	**12**	**25**
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	2	2
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	1	1
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	18
29	**7.01.4.01.0.00.03**	**Kecamatan Rangsang**	**5**	**12**	**26**
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	2	2
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	1	1
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	19
30	**7.01.4.01.0.00.04**	**Kecamatan Rangsang Barat**	**6**	**10**	**20**
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	2	2
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	1	1
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	1	1
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	4	12
31	**7.01.4.01.0.00.05**	**Kecamatan Merbau**	**5**	**14**	**40**
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	3	3
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	2	4
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	29
32	**7.01.4.01.0.00.06**	**Kecamatan Pulau Merbau**	**5**	**11**	**26**
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	1	1
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	1	1
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	20
33	**7.01.4.01.0.00.07**	**Kecamatan Rangsang Pesisir**	**5**	**11**	**28**
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	2	2
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	1	1
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	21
34	**7.01.4.01.0.00.08**	**Kecamatan Tasik Putri Puyu**	**4**	**10**	**21**
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	2	2
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	15
35	**7.01.4.01.0.00.09**	**Kecamatan Tebing Tinggi Timur**	**5**	**11**	**19**
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	2	2
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	1	1
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	1	2

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	13

Rekap Program dan Kegiatan Tahapan Rancangan Akhir Tahun Perencanaan 2021
Kabupaten Kepulauan Meranti - Provinsi Riau

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
1	**1.01.2.22.0.00.01**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**7**	**17**	**57**
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	4	33
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	1	2
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	1	1
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	3	3
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	1	2
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	2	2
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	5	14
2	**1.02.0.00.0.00.01**	**Dinas Kesehatan**	**4**	**17**	**67**
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	3	32
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	3	5
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	3	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	8	27
3	**1.02.0.00.0.00.02**	**Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)**	**3**	**9**	**13**
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	2	4
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	1	1
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	8
4	**1.03.1.04.0.00.01**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**17**	**30**	**71**
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	2	9
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	1	5
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	1	1
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	1	1
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	1	2

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	1	1
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	1	3
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	1	1
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	1	8
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	1	1
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	2	3
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	4	7
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	2	4
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	1	1
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	1	2
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	8	21
5	**1.05.0.00.0.00.01**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**2**	**7**	**11**
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	2	2
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	5	9
6	**1.05.0.00.0.00.02**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**2**	**10**	**31**
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	3	11
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	20
7	**1.06.2.08.2.14.01**	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**10**	**21**	**26**
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	2	2
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	1	1
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	2	3
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	2	2
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	3	3
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	1	1

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	1	1
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	1	1
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	2	2
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	10
8	**2.09.3.27.0.00.01**	**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan**	**8**	**17**	**38**
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	1	1
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	1	1
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	3	5
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	1	3
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	3	5
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	1	1
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	1	4
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	18
9	**2.11.0.00.0.00.01**	**Dinas Lingkungan Hidup**	**8**	**14**	**27**
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	2	2
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	1	2
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	1	1
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	1	1
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	1	1
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	1	1
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	1	2

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	17
10	**2.12.0.00.0.00.01**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**5**	**13**	**32**
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	2	4
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	2	4
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	2	3
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	1	2
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	19
11	**2.13.0.00.0.00.01**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**4**	**9**	**25**
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	-	1	1
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	1	4
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	1	4
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	16
12	**2.15.0.00.0.00.01**	**Dinas Perhubungan**	**3**	**10**	**17**
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	2	4
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	1	2
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	11
13	**2.18.2.07.0.00.01**	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**	**8**	**14**	**30**
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	1	1
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	1	1
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	1	1
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	1	1
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	1	3
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	1	2
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	1	1
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	20
14	**2.23.2.24.0.00.01**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**3**	**9**	**19**

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	2	3
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	1	2
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	14
15	**3.25.2.20.0.00.01**	**Dinas Perikanan**	**3**	**9**	**23**
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	2	3
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	2	4
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	5	16
16	**3.26.2.19.0.00.01**	**Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**6**	**14**	**27**
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	1	1
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	3	3
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	2	3
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	1	1
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	2	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	5	16
17	**3.30.3.31.2.17.01**	**Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah**	**8**	**15**	**25**
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	1	2
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	1	2
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	1	1
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	2	2
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	1	1
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	1	1
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	1	2
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	14
18	**3.27.0.00.0.00.01**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**	**5**	**11**	**18**
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	2	3

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	2	2
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	1	1
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	1	2
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	5	10
19	**6.01.0.00.0.00.01**	**Inspektorat Daerah**	**3**	**11**	**35**
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	2	6
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	2	5
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	24
20	**5.01.5.05.4.01.01**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**4**	**17**	**58**
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	3	13
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	3	17
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	4	7
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	21
21	**5.02.0.00.0.00.01**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**3**	**14**	**38**
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	5	18
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	1	4
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	8	16
22	**5.02.0.00.0.00.02**	**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**	**2**	**8**	**28**
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	1	9
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	19
23	**5.03.0.00.0.00.01**	**Badan Kepegawaian Daerah**	**3**	**12**	**39**
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	4	17
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	1	1
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	21

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
24	**4.01.2.16.5.06.01**	**Sekretariat Daerah**	**8**	**26**	**96**
	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	1	7
	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	-	2	6
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	1	2
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	1	1
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	3	9
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	4	9
	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	-	2	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	12	59
25	**4.02.0.00.0.00.01**	**Sekretariat DPRD**	**2**	**14**	**38**
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	6	15
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	8	23
26	**8.01.0.00.0.00.01**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**	**6**	**10**	**17**
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	1	1
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	1	2
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	1	1
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	1	1
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	5	9
27	**7.01.4.01.0.00.01**	**Kecamatan Tebing Tinggi**	**5**	**14**	**38**
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	2	2

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	3	4
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7	28
28	**7.01.4.01.0.00.02**	**Kecamatan Tebing Tinggi Barat**	**5**	**10**	**21**
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	1	1
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	1	1
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	15
29	**7.01.4.01.0.00.03**	**Kecamatan Rangsang**	**5**	**10**	**21**
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	1	1
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	1	1
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	1	2
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	16
30	**7.01.4.01.0.00.04**	**Kecamatan Rangsang Barat**	**5**	**10**	**20**
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	2	2
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	1	1
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	5	13
31	**7.01.4.01.0.00.05**	**Kecamatan Merbau**	**5**	**13**	**23**
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	3	3
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	2	3

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	1	2
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	14
32	**7.01.4.01.0.00.06**	**Kecamatan Pulau Merbau**	**5**	**10**	**20**
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	1	1
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	1	1
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	14
33	**7.01.4.01.0.00.07**	**Kecamatan Rangsang Pesisir**	**5**	**10**	**18**
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	1	1
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	1	1
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	1	2
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	13
34	**7.01.4.01.0.00.08**	**Kecamatan Tasik Putri Puyu**	**4**	**10**	**21**
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	2	2
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	1	3
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	15
35	**7.01.4.01.0.00.09**	**Kecamatan Tebing Tinggi Timur**	**5**	**10**	**18**
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1	1
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	1	1
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	1	1
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	1	2

NO	KODE	OPD / PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	6	13

DATA EVIDEN (2)

INDIKATOR TINGKAT KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

FORMULASI PENGHITUNGAN

$$X1 = \frac{Jumlah\ sasaran\ RPJMD\ yang\ menjadi\ sasaran\ dalam\ Renstra\ PD}{Jumlah\ seluruh\ sasaran\ RPJMD} x\ 100\%$$

$$X2 = \frac{Jumlah\ indikator\ sasaran\ RPJMD\ yang\ menjadi\ indikator\ sasaran\ dalam\ Renstra\ PD}{Jumlah\ seluruh\ indikator\ sasaran\ RPJMD} x\ 100\%$$

$$X3 = \frac{Jumlah\ program\ pada\ Renstra\ PD\ yang\ sesuai\ RPJMD}{Jumlah\ seluruh\ program\ Renstra\ PD} x\ 100\%$$

$$X4 = \frac{Jumlah\ sasaran\ dalam\ RKPD\ yang\ sesuai\ RPJMD}{Jumlah\ seluruh\ sasaran\ RKPD} x\ 100\%$$

$$X5 = \frac{Jumlah\ program\ dalam\ RKPD\ yang\ sesuai\ RPJMD}{Jumlah\ seluruh\ program\ RKPD} x\ 100\%$$

$$X6 = \frac{Jumlah\ program\ pada\ Renja\ PD\ yang\ sesuai\ dengan\ program\ Renstra\ PD}{Jumlah\ seluruh\ program\ pada\ Renja\ PD} x\ 100\%$$

$$X7 = \frac{Jumlah\ kegiatan\ pada\ Renja\ PD\ yang\ sesuai\ dengan\ kegiatan\ Renstra\ PD}{Jumlah\ seluruh\ kegiatan\ pada\ Renja\ PD} x\ 100\%$$

$$X = \frac{X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7}{7} x\ 100\%$$

$X1 = \frac{11}{11} x\ 100\%$ = 100

$X2 = \frac{20}{20} x\ 100\%$ = 100

$X3 = \frac{339}{339} x\ 100\%$ = 100

$X4 = \frac{11}{11} x\ 100\%$ = 100

$X5 = \frac{142}{142} x\ 100\%$ = 100

$X6 = \frac{142}{142} x\ 100\%$ = 100

$X7 = \frac{881}{881} x\ 100\%$ = 100

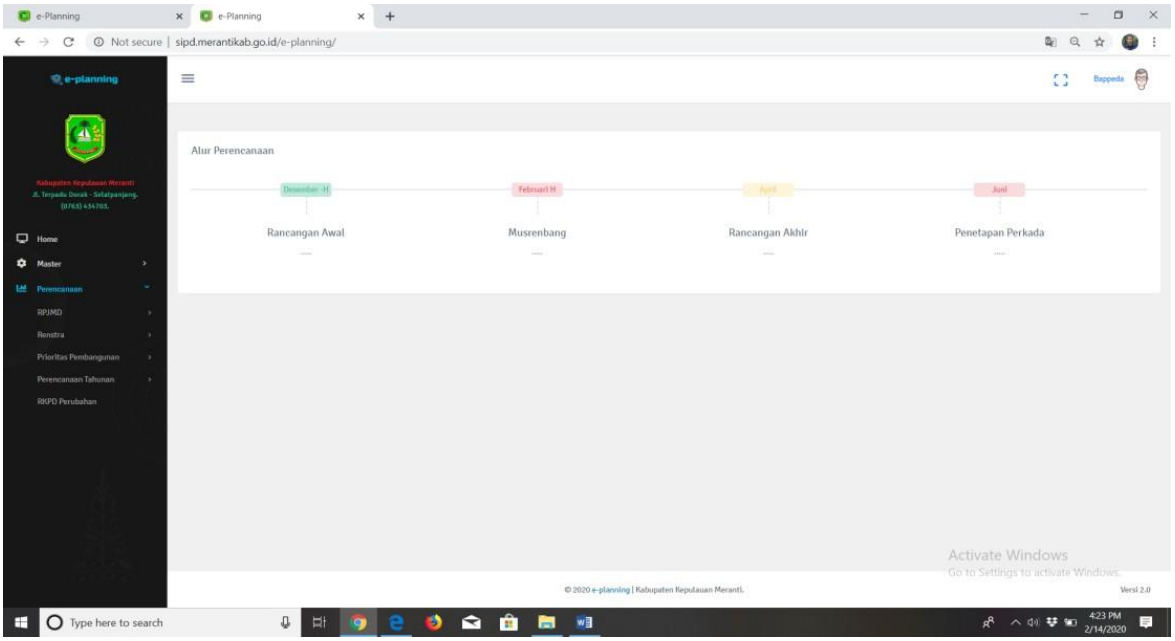

Program dalam RPJMD

KODE	NAMA PROGRAM
0.0.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.0.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.0.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.0.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.0.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal
1.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.01.02.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.01.02.17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.01.02.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1.01.02.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.01.02.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.01.02.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.01.02.25.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1.01.02.26.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1.01.02.27.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1.01.02.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.01.02.34.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
1.01.02.35.	Program Kesehatan Gizi Masyarakat
1.01.03.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.01.03.16.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1.01.03.17.	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1.01.03.18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.01.03.19.	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
1.01.03.20.	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
1.01.03.21.	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
1.01.03.23.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1.01.03.24.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1.01.03.25.	Program penyediaan dan pengolahan air baku
1.01.03.26.	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1.01.03.27.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1.01.03.28.	Program pengendalian banjir
1.01.03.30.	Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.01.03.31.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
1.01.03.32.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan
1.01.03.33.	Program Perencanaan Tata Ruang
1.01.03.34.	Program Pemanfaatan Ruang
1.01.03.35.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.01.04.15.	Program Pengembangan Perumahan
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.01.04.17.	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
1.01.04.18.	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
1.01.04.19.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.01.04.20.	Program Pengelolaan Areal Pemakaman
1.01.04.21.	Program kegiatan pemberdayaan komunitas permukiman
1.01.04.23.	Program pembangunan saluran drainase permukiman
1.01.04.24.	Program pembangunan jalan lingkungan permukiman

KODE	NAMA PROGRAM
1.01.05.15.	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
1.01.06.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.01.06.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.01.06.18.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
1.01.06.20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1.01.06.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.01.06.22.	Program Rehabilitasi Korban Bencana
1.01.06.23.	Program Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga
1.01.06.24.	Program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial
1.01.06.25.	Program Penyuluhan Sosial
1.02.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.02.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.02.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.02.02.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
1.02.02.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.02.02.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.02.02.18.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1.02.04.16.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.02.04.18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
1.02.05.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.02.05.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.02.05.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.02.05.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.02.05.22.	Program Pengendalian kebakaran hutan
1.02.05.24.	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.02.05.25.	Program Penataan Keindahan Kota
1.02.05.26.	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi
1.02.05.27.	Program Kedaruratan dan Logistik
1.02.05.28.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.02.05.29.	Program Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Kecelakaan
1.02.05.30.	Program Rehabilitasi / Rekonstruksi Bencana Alam, Sosial dan Kecelakaan
1.02.05.31.	Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan
1.02.05.32.	Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air
1.02.05.33.	Program pencegahan dini dan kesiagaan kebakaran dan bencana alam
1.02.06.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.02.07.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.02.07.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1.02.07.17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.02.07.18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.02.07.20.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa
1.02.08.15.	Program Keluarga Berencana
1.02.08.16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1.02.08.17.	Program Pelayanan Kontrasepsi
1.02.08.18.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang madiri
1.02.08.20.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
1.02.08.24.	Program pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PADU
1.02.08.25.	Program pengendalian penduduk
1.02.09.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.02.09.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.02.09.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.02.09.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.02.09.19.	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

KODE	NAMA PROGRAM
1.02.09.21.	Program pembangunan dermaga / pelabuhan
1.02.09.22.	Program rehabilitasi / pemeliharaan terminal / pelabuhan
1.02.09.23.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1.02.10.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.02.10.16.	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
1.02.10.17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1.02.10.18.	Program kerjasama informasi dan media massa
1.02.10.19.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.02.10.21.	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
1.02.10.22.	Program Pengembangan Infrastruktur komunikasi dan Informatika
1.02.10.23.	Program monitoring dan evaluasi infrastruktur dasar komunikasi dan informatika
1.02.10.24.	Program pengembangan aplikasi komputer
1.02.11.15.	Program penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif
1.02.11.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.02.11.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.02.11.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.02.11.19.	Program Pengembangan Modal Usaha Koperasi dan UMKM
1.02.12.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.02.12.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.02.12.18.	Program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan.
1.02.12.19.	Program Penertiban, Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan.
1.02.12.20.	Program Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal.
1.02.12.21.	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
1.02.13.15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1.02.13.16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.02.13.17.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1.02.13.18.	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
1.02.13.19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
1.02.13.20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.02.13.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.02.14.15.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1.02.16.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya
1.02.16.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.02.16.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.02.16.18.	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
1.02.17.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.02.18.15.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1.02.18.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1.02.18.17.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
1.02.18.18.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
2.01.01.20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2.01.01.21.	Program Pengendalian Perikanan Tangkap
2.01.01.25.	Program Pengembangan /Penguatan Kelembagaan Masyarakat
2.01.02.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2.01.02.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.01.02.17.	Program Pengembangan Kemitraan
2.01.02.20.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata
2.01.02.21.	Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
2.01.02.22.	Program Kerja Sama Pengembangan Ekonomi Kreatif
2.01.02.24.	Program pengembangan kreatifitas sumber daya manusia
2.01.02.25.	Program peningkatan sarana dan prasarana ekonomi kreatif
2.01.02.26.	Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang kesenian daerah
2.01.03.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

KODE	NAMA PROGRAM
2.01.03.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
2.01.03.17.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2.01.03.18.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2.01.03.19.	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
2.01.03.20.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan
2.01.03.21.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2.01.03.22.	Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.01.03.23.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
2.01.03.24.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
2.01.03.25.	Program prasarana dan sarana pertanian/perkebunan
2.01.04.17.	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
2.01.05.15.	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
2.01.05.17.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
2.01.05.18.	Program pembinaan pengembangan energi baru dan konservasi energi
2.01.05.19.	Program pembinaan dan pengawasan giologi dan air tanah
2.01.06.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.01.06.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2.01.06.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.01.07.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.01.07.17.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2.01.07.18.	Program Penataan Struktur Industri
2.01.07.19.	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
2.01.07.20.	Program peningkatan industri kecil dan menengah
3.01.01.15.	Program Pencegahan Korupsi
3.01.01.16.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
3.01.01.17.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan
3.01.02.15.	Program Pengembangan Data / Informasi
3.01.02.16.	Program Kerjasama Pembangunan
3.01.02.17.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
3.01.02.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
3.01.02.19.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
3.01.02.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.01.02.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3.01.02.23.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya
3.01.02.24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
3.01.02.25.	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
3.01.03.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3.01.03.31.	Program Peningkatan Penerimaan Daerah
3.01.03.34.	Program peningkatan pendapatan daerah
3.01.04.17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4.01.01.15.	Program Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan
4.01.01.16.	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
4.01.01.17.	Program Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan
4.01.01.18.	Program Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional
4.01.01.19.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Daerah
4.01.01.20.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
4.01.01.21.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
4.01.01.22.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
4.01.01.23.	Program Penanganan Perkara Pemerintah Daerah
4.01.01.24.	Program Pembinaan dan Peningkatan SDM
4.01.02.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.03.15.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
5.01.01.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

KODE	NAMA PROGRAM
5.01.01.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
5.01.01.17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5.01.01.19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
5.01.01.20.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
5.01.01.21.	Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program Renstra

KODE	NAMA PROGRAM
0.0.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.0.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.0.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.0.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.0.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal
1.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.01.02.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.01.02.17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.01.02.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1.01.02.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.01.02.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.01.02.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.01.02.25.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1.01.02.26.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1.01.02.27.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1.01.02.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.01.02.34.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
1.01.02.35.	Program Kesehatan Gizi Masyarakat
1.01.03.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.01.03.16.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1.01.03.17.	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1.01.03.18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.01.03.19.	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
1.01.03.23.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1.01.03.24.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1.01.03.25.	Program penyediaan dan pengolahan air baku
1.01.03.26.	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1.01.03.27.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1.01.03.28.	Program pengendalian banjir
1.01.03.30.	Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.01.03.31.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
1.01.03.32.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan
1.01.03.33.	Program Perencanaan Tata Ruang
1.01.03.34.	Program Pemanfaatan Ruang
1.01.03.35.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.01.04.15.	Program Pengembangan Perumahan
1.01.04.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.01.04.18.	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
1.01.04.19.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

KODE	NAMA PROGRAM
1.01.04.20.	Program Pengelolaan Areal Pemakaman
1.01.04.21.	Program kegiatan pemberdayaan komunitas permukiman
1.01.04.23.	Program pembangunan saluran drainase permukiman
1.01.04.24.	Program pembangunan jalan lingkungan permukiman
1.01.05.15.	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
1.01.06.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.01.06.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.01.06.18.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
1.01.06.20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1.01.06.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.01.06.22.	Program Rehabilitasi Korban Bencana
1.01.06.23.	Program Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga
1.01.06.24.	Program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial
1.01.06.25.	Program Penyuluhan Sosial
1.02.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.02.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.02.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.02.02.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
1.02.02.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.02.02.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.02.02.18.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1.02.04.16.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.02.04.18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
1.02.05.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.02.05.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.02.05.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.02.05.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.02.05.22.	Program Pengendalian kebakaran hutan
1.02.05.24.	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.02.05.25.	Program Penataan Keindahan Kota
1.02.05.27.	Program Kedaruratan dan Logistik
1.02.05.28.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.02.05.30.	Program Rehabilitasi / Rekonstruksi Bencana Alam, Sosial dan Kecelakaan
1.02.05.31.	Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan
1.02.05.32.	Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air
1.02.06.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.02.07.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.02.07.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1.02.07.17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.02.07.18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.02.07.20.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa
1.02.08.15.	Program Keluarga Berencana
1.02.08.16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1.02.08.17.	Program Pelayanan Kontrasepsi
1.02.08.18.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang madiri
1.02.08.20.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
1.02.08.24.	Program pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PADU
1.02.08.25.	Program pengendalian penduduk
1.02.09.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.02.09.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.02.09.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.02.09.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

KODE	NAMA PROGRAM
1.02.09.19.	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
1.02.09.21.	Program pembangunan dermaga / pelabuhan
1.02.09.22.	Program rehabilitasi / pemeliharaan terminal / pelabuhan
1.02.09.23.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1.02.10.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.02.10.16.	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
1.02.10.17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1.02.10.18.	Program kerjasama informasi dan media massa
1.02.10.19.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.02.10.21.	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
1.02.10.22.	Program Pengembangan Infrastruktur komunikasi dan Informatika
1.02.11.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.02.11.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.02.11.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.02.11.19.	Program Pengembangan Modal Usaha Koperasi dan UMKM
1.02.12.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.02.12.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.02.12.18.	Program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan.
1.02.12.19.	Program Penertiban, Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan.
1.02.12.20.	Program Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal.
1.02.12.21.	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
1.02.13.15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1.02.13.16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.02.13.17.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1.02.13.19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
1.02.13.20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.02.13.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.02.14.15.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1.02.16.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya
1.02.16.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.02.16.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.02.16.18.	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
1.02.17.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.02.18.15.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1.02.18.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1.02.18.17.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
1.02.18.18.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
2.01.01.20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2.01.01.21.	Program Pengendalian Perikanan Tangkap
2.01.01.25.	Program Pengembangan /Penguatan Kelembagaan Masyarakat
2.01.02.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2.01.02.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.01.02.17.	Program Pengembangan Kemitraan
2.01.02.20.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata
2.01.02.21.	Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
2.01.02.22.	Program Kerja Sama Pengembangan Ekonomi Kreatif
2.01.03.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01.03.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
2.01.03.17.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2.01.03.18.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2.01.03.19.	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
2.01.03.20.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan
2.01.03.21.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

KODE	NAMA PROGRAM
2.01.03.22.	Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.01.03.23.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
2.01.03.24.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
2.01.03.25.	Program prasarana dan sarana pertanian/perkebunan
2.01.04.17.	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
2.01.05.15.	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
2.01.05.17.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
2.01.06.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.01.06.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2.01.06.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.01.07.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.01.07.17.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2.01.07.18.	Program Penataan Struktur Industri
2.01.07.19.	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
3.01.01.15.	Program Pencegahan Korupsi
3.01.01.16.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
3.01.01.17.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan
3.01.02.15.	Program Pengembangan Data / Informasi
3.01.02.16.	Program Kerjasama Pembangunan
3.01.02.17.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
3.01.02.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
3.01.02.19.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
3.01.02.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.01.02.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3.01.02.23.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya
3.01.02.24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
3.01.02.25.	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
3.01.03.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3.01.03.31.	Program Peningkatan Penerimaan Daerah
3.01.03.34.	Program peningkatan pendapatan daerah
3.01.04.17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4.01.01.15.	Program Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan
4.01.01.16.	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
4.01.01.17.	Program Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan
4.01.01.18.	Program Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional
4.01.01.19.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Daerah
4.01.01.20.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
4.01.01.21.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
4.01.01.22.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
4.01.01.23.	Program Penanganan Perkara Pemerintah Daerah
4.01.01.24.	Program Pembinaan dan Peningkatan SDM
4.01.02.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.03.15.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
5.01.01.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5.01.01.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
5.01.01.17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5.01.01.19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
5.01.01.20.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
5.01.01.21.	Program Pendidikan Politik Masyarakat

Indikator Sasaran Renstra

Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Renstra
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Partisipsi Sekolah (APS)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Seni Budaya dan Cagar Budaya yang Terkelola dengan Baik
Dinas Kesehatan	Angka Kematian Bayi
Dinas Kesehatan	Angka Kematian Balita
Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu
Dinas Kesehatan	Indek Kepuasaan Masyarakat
Dinas Kesehatan	Persentase Bebas Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa
Dinas Kesehatan	Persentase ODHA yang mengetahui status HIV nya
Dinas Kesehatan	Persentase penduduk dengan gula darah tinggi yang dilayani
Dinas Kesehatan	Persentase penduduk dengan tekanan darah tinggi yang dilayani
Dinas Kesehatan	Succes Rate TB
Dinas Kesehatan	Tingkat Akreditasi Puskesmas
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Kelas Rumah Sakit
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rasio Luas Cakupan Pelayanan air bersih di Kabupaten Kepulauan Meranti
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	indeks kepuasan masyarakat (IKM)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase pembentukan desa tangguh bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat Waktu Tanggap
Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat (Pekat)
Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Penegakan Perda
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (TFR)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase PMKS yang tertangani
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan	Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM)
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan	Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan	Nilai evaluasi Sakip Daerah
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan	Nilai Investasi

Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Renstra
dan Peternakan	
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan	Persentase infrastruktur dasar
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan	Pertumbuhan PDRB
Dinas Lingkungan Hidup	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan
Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Evaluasi SAKIP OPD
Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air
Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Udara
Dinas Lingkungan Hidup	Persentase cakupan area pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup	Persentase jumlah sampah yang tertangani
Dinas Lingkungan Hidup	Persentase kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program lingkungan hidup
Dinas Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab kegiatan/usaha yang dibina/diawasi terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU yang diterbitkan Pemerintah Daerah
Dinas Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti
Dinas Lingkungan Hidup	Persentase sejumlah sampah yang terkurangi melalui 3R
Dinas Lingkungan Hidup	Persentase volume timbulan sampah yang ditangani
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Instansi Pengguna yang melakukan kerjasama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk memiliki dokumen Administrasi kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rata-rata waktu penyelesaian pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan APBDes Tertib dan Tepat Waktu
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Lembaga Desa Aktif
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Dinas Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Perhubungan	Persentase tersedianya pelabuhan laut yang aman dan selamat
Dinas Perhubungan	Persentase tersedianya jaringan moda transportasi laut yang aman dan selamat
Dinas Perhubungan	Persentase tersedianya jaringan moda transportasi darat yang aman dan selamat
Dinas Perhubungan	Persentase tersedianya pelabuhan Ro-Ro yang aman dan selamat
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Nilai Investasi
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Persentase Penyelesaian Perselisihan Pekerja dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase Jumlah OPD yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai standar
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase Pemustaka Pertahun
Dinas Perikanan	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Dinas Perikanan	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Dinas Perikanan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Jumlah Kunjungan Wisatawan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Jumlah prestasi pemuda bidang olah raga tingkat Provinsi dan /atau nasional
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Jumlah Produk Kreatif berbasis seni dan budaya
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Jumlah Wirausaha Muda
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Persentase sarana dan prasarana pembinaan pemuda dan olahraga yang baik
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan

Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Renstra
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Persentase Koperasi Sehat
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Persentase peningkatan sarana dan prasarana produksi komoditas lokal
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana pusat-pusat perniagaan yang beroperasi dengan baik
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan UMKM aktif
Dinas Perkebunan dan Hortikultura	IKM
Dinas Perkebunan dan Hortikultura	Jumlah Kelembagaan Petani Yang Mandiri
Dinas Perkebunan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Hortikultura
Dinas Perkebunan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Perkebunan
Inspektorat Daerah	Jumlah OPD yang ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM
Inspektorat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mempunyai Sertifikasi (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian)
Inspektorat Daerah	Level Kapabilitas APIP
Inspektorat Daerah	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Meranti
Inspektorat Daerah	Persentase Obrik yang bebas penyimpangan aset yang material Inspektorat
Daerah	Persentase Obrik yang bebas penyimpangan keuangan yang material
Inspektorat Daerah	Persentase OPD yang Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal BB
Inspektorat Daerah	Persentase Penyelesaian Review dan Evaluasi
Inspektorat Daerah	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai evaluasi Sakip Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kajian yang di manfaatkan untuk perumusan kebijakan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penetapan dokumen perencanaan tepat waktu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan tahunanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Rencana Pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tahapan Penyusunan APBD Tepat Waktu
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Pertahun
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Badan Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Badan Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu
Badan Kepegawaian Daerah	persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai
Badan Kepegawaian Daerah	persentase penempatan jabatan administrasi yang diisi sesuai dengan standar kompetensi
Sekretariat Daerah	Implementasi IT Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah	Indeks Kerukunan Umat Beragama
Sekretariat Daerah	Jumlah Produk Hukum/Regulasi Daerah yang dihasilkan sesuai Legalitas Daerah
Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Meranti (Nilai LPPD)
Sekretariat Daerah	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah selesai tepat waktu
Sekretariat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran Daerah
Sekretariat Daerah	Rata - Rata IKM Kabupaten
Sekretariat Daerah	Rekomendasi Kebijakan Bidang Inflasi
Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Persentase Demokrasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Persentase Penurunan Konflik

Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Renstra
Kecamatan Tebing Tinggi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Tebing Tinggi	Prosentase pelayanan administrasi umum lainnya yang tepat waktu
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Tebing Tinggi Barat	Persentase Pelayanan Administrasi Tepat Waktu
Kecamatan Rangsang	Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Rangsang	Persentase pelayanan administrasi umum lainnya yang tepat waktu
Kecamatan Rangsang Barat	Indeks kepuasan masyarakat
Kecamatan Rangsang Barat	Persentase pelayanan administrasi yang tepat waktu
Kecamatan Merbau	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Merbau	Persentase Pelayanan Administrasi Umum lainnya yang tepat waktu
Kecamatan Pulau Merbau	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Pulau Merbau	Persentase Pelayanan Administrasi Umum lainnya yang tepat waktu
Kecamatan Rangsang Pesisir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Rangsang Pesisir	Persentase pelayanan administrasi umum lainnya yang tepat wakttu
Kecamatan Tasik Putri Puyu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Tasik Putri Puyu	Persentase Pelayanan Administrasi Umum lainnya yang Tepat waktu
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Tebing Tinggi Timur	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Tepat Waktu

Indikator Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama
2	Penyakit Masyarakat yang berhasil di Tangani
3	Persentase peningkatan sarana dan prasarana produksi komoditas lokal
4	Persentase peningkatan sarana dan prasarana pusat-pusat perniagaan yang beroperasi dengan baik
5	Harapan Lama Sekolah (HLS)
6	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
7	Angka Harapan Hidup
8	Kelas Rumah Sakit
9	Opini BPK
10	Nilai evaluasi Sakip Daerah
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
12	Angka kemiskinan
13	Pertumbuhan PDRB
14	Nilai Investasi
15	Persentase infrastruktur dasar
16	Persentase Peningkatan Konektivitas Laut dan Darat
17	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya
18	Indeks kualitas lingkungan hidup
19	Persentase Peningkatan Peran Masyarakat dalam pelestarian Lingkungan Hidup
20	Persentase Pelayanan Administrasi Umum lainnya yang Tepat waktu

DATA EVIDEN (3)

INDIKATOR TINGKAT KESELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN DENGAN PROVINSI DAN NASIONAL

FORMULASI PENGHITUNGAN

$$X1 = \frac{Jumlah\ prioritas\ pembangunan\ kabupaten\ yang\ selaras\ prioritas\ pembangunan\ provinsi}{Jumlah\ seluruh\ prioritas\ pembangunan\ kabupaten} x\ 100\%$$

$$X2 = \frac{Jumlah\ prioritas\ pembangunan\ kabupaten\ yang\ selaras\ prioritas\ pembangunan\ nasional}{Jumlah\ seluruh\ prioritas\ pembangunan\ kabupaten} x\ 100\%$$

%

$$X = \frac{X1 + X2}{2} x\ 100\%$$

$x1 = \frac{5}{5} x100\%$ = 100	$x2 = \frac{5}{5} x100\%$ = 100

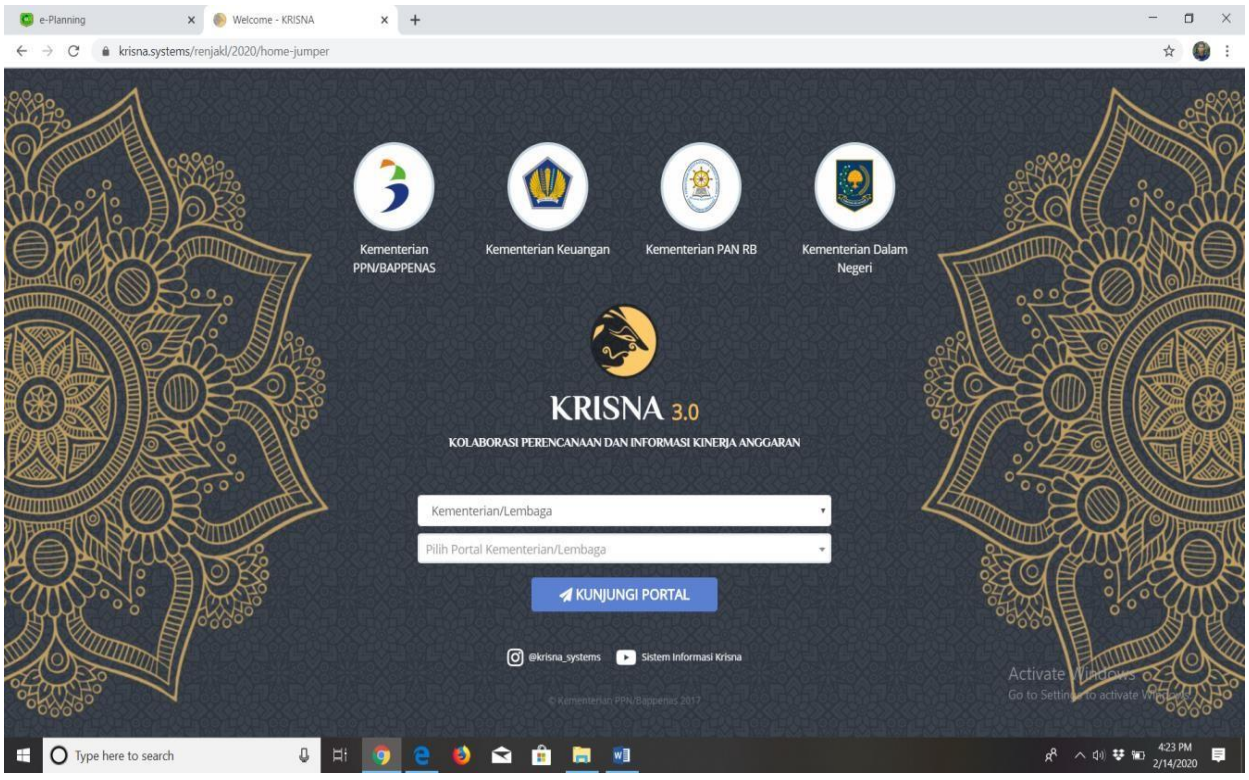

1. Prioritas pembangunan nasional tahun 2021 berjumlah 7 (tujuh) prioritas yakni:
   a. Ketahanan ekonomi, untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
   b. Pengembangan wilayah, untuk mengurangi kesenjangan ;
   c. Sumber daya manusia, yang berkualitas dan berdaya saing;
   d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
   e. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
   f. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
   g. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

2. Prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2021 berjumlah 5 (lima) prioritas yakni:
   a. Pengembangan industri;
   b. Pengembangan pertanian;
   c. Pengembangan pariwisata;
   d. Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
   e. Pengembangan SDM yang beriman, berkualitas dan berdaya saing.

2. Prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 berjumlah 5 (lima) prioritas yakni;

   a. Optimalisasi penanganan pandemic Covid-19 serta dampak social dan ekonominya masyarakat
   b. Penguatan pengelolaan sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan parawisata untuk membukalapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah produk;
   c. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
   d. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar;
   e. Meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan public yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan Teknologi (e-Govermment).

DATA EVIDEN (4)

NILAI EVALUASI SAKIP DAERAH

FORMULASI PENGHITUNGAN

Berdasarkan PermenPAN 12 Tahun 2015

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS http ://www.menpan.go.id

Nomor : B/207/AA.05/2021 31 Maret 2021
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Yth. **Bupati Kepulauan Meranti**
di
Selatpanjang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil *(outcome)* terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil *(result oriented government)*** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperoleh nilai **68,05** atau predikat "**B**". **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum signifikan dan masih perlu untuk disempurnakan.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,98	23,06
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,64	16,16
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,6	10,37
d.	Evaluasi Internal	10	6,11	6,76
e.	Capaian Kinerja	20	12,13	11,7
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**67,46**	**68,05**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Uraian singkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2019, sehingga belum terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja yang signifikan.
2. Kelemahan yang masih dijumpai antara lain sebagai berikut:
   a. Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan pada dokumen perencanaan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi serta belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang *SMART*. Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan tidak memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat;
   b. Penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu, penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan sehingga belum terlihat hubungan lintas fungsi antar OPD yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja secara menyeluruh;
   c. Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada OPD sehingga implementasi SAKIP masih pada tahap administrasi saja. Belum sepenuhnya terlihat adanya keterlibatan pimpinan OPD dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan penetapan kinerja dan strategi yang diperlukan;
   d. Pimpinan OPD belum terlibat aktif dalam pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi efektivitas program/kegiatan dalam mencapai kinerja, serta pengambilan keputusan atas perubahan strategi jika diperlukan yang dapat menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
   e. Kualitas pengungkapan informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja masih terbatas sehingga belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya;
   f. Hasil evaluasi internal SAKIP yang telah dilakukan oleh Inspektorat terhadap perangkat daerah belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan; dan
   g. Rendahnya kualitas implementasi SAKIP mengakibatkan upaya reformasi birokrasi yang dilakukan belum mendukung pencapaian kinerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan untuk melakukan reviu dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran

strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu pohon kinerja yang telah disusun sampai ke level individu;

2. Melakukan reviu atas keselarasan antara kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan;
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mengintegrasikan fungsi perencanaan, keuangan, dan kinerja untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh;
4. Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi dan tawar menawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang akan dilakukannya, serta memberikan *reward* dan *punishment* bagi pimpinan sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja;
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja;
6. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal, sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan *professional judgement* secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
7. Menjadikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

Agus Uji Hantara

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Riau.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan:

PENGHARGAAN

Kepada:

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

atas prestasinya dalam:

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

dengan Predikat Nilai

Jakarta, 22 April 2021

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo

DATA EVIDEN
(5)
PERSENTASE PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN TEPAT WAKTU

FORMULASI PENGHITUNGAN

$$\frac{Jumlah\ dokumen\ yang\ disusun\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ dokumen} \times 100\ \%$$

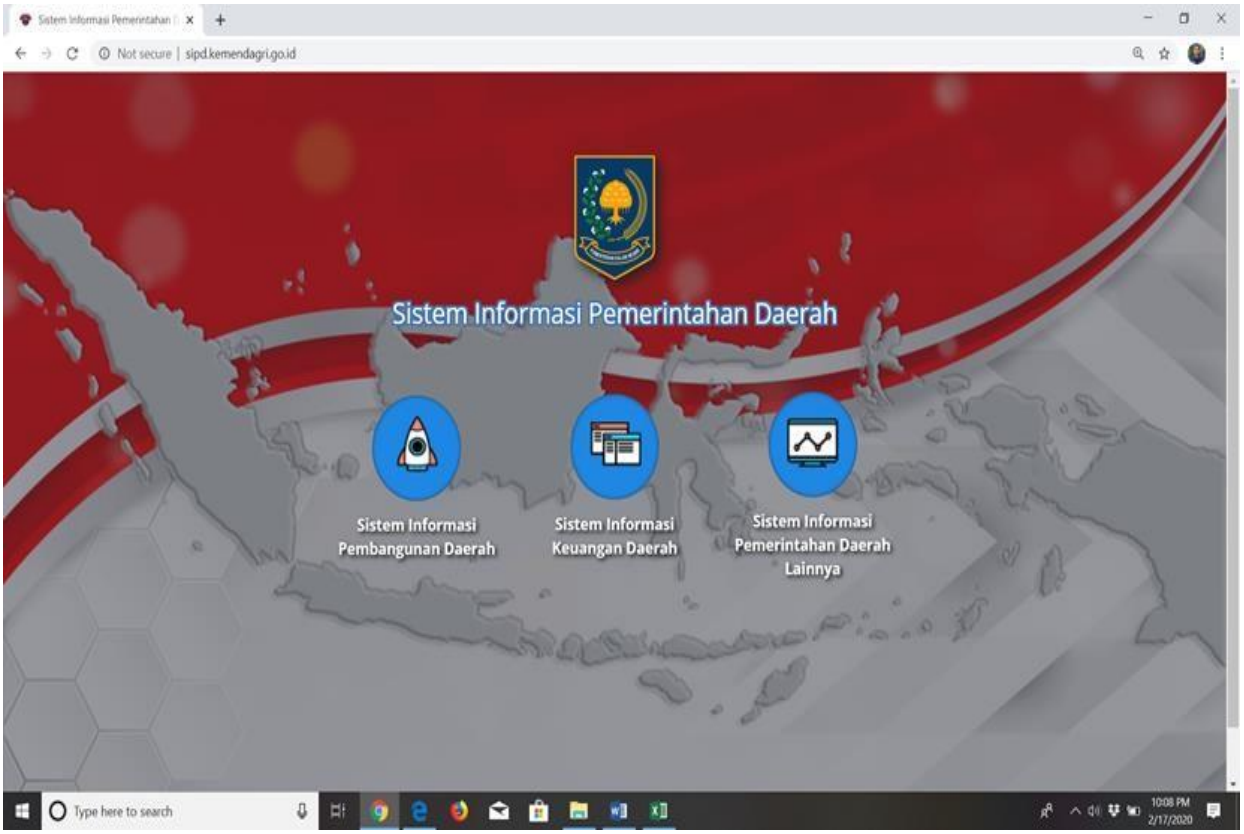

EVALUASI PENILAIAN PERENCANAAN TEPAT WAKTU
TERHADAP TAHAPAN PENYUSUAN RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	TAHAPAN	JADWAL*	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan	Paling lambat minggu kedua pada bulan Februari	2 - 10 Maret 2021	Tidak Sesuai
2	Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah tentang Penyusunan Renja PD	Minggu ke 2 (dua) bulan Februari	22 Februari 2021	Sesuai
3	Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah	Dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah	29-31 Maret 2021	Sesuai
4	Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD	Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang	6 Apr 2021	Tidak Sesuai
5	Musrenbang RKPD kabupaten/kota	Minggu Pertama Bulan April	15 April 2021	Tidak Sesuai
6	Penetapan RKPD Kabupaten	Paling Lambat Akhir Bulan Juni	30 Juli 2021	Tidak Sesuai
7	Penetapan Perkada Renja PD	Paling Lambat 1 Bulan Setelah Perkada RKPD	30 Agustus 2021	Sesuai

*) Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

M. Sakinul Wadi, S.H.I
Penata / III.c
NIP. 19840120 200212 1 001

DATA EVIDEN (6)

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

FORMULASI PENGHITUNGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Komplek Perkantoran Terpadu Jl Johari Dagang Selatpanjang
Telp. 0763 – 434703 Fax. 0763 – 434703
Kode Pos 28753

Selatpanjang, 17 Januari 2022

Nomor : 050/Bappeda-Set/I/2022/
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Hasil Indek Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2021 di BAPPEDA

Kepada Yth,
Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana
Kabupaten Kepulauan Meranti
Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 060/ORG/61 tentang Permintaan Data IKM Perangkat Daerah Triwulan IV tahun 2021, berkaitan dengan hal tersebut maka kami sampaikan Hasil IKM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan meranti triwulan IV Tahun 2021. (Data terlampir)

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

M. SAKINUL WADI, S.H.I
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 19800823 201102 1 001

PENERIMA:
NORISNA
NIP. 19790622 200901 2.002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang;
2. Sekretaris Daerah Kabupeten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN TW IV

UNIT PELAYANAN : Kantor BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti
ALAMAT : Komplek Perkantoran Terpadu, Jl. Johari Dagang Selatpanjang
Tlp/Fax : 0763-434703

No. Resp	NILAI UNSUR PELAYANAN												Rata-rata
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	
1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3.84
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4.56
3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	4.44
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4.56
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4.56
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4.56
7	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4.56
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4.56
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4.56
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4.56
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4.68
Nilai/Unsur	**32**	**32**	**32**	**31**	**33**	**33**	**32**	**32**	**31**	**33**	**25**	**33**	**43.68**
NRR/Unsur	**2.909**	**2.909**	**2.909**	**2.818**	**3.000**	**3.000**	**2.909**	**2.909**	**2.818**	**3.000**	**2.273**	**3.000**	**3.91**
NRR Tertimbang/Unsur	**0.241**	**0.241**	**0.241**	**0.234**	**0.249**	**0.249**	**0.241**	**0.241**	**0.234**	**0.249**	**0.189**	**0.249**	**2.860**
IKM Unit Pelayanan													**85.792**

Keterangan :

- U1 s.d U12 = Unsur - unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata - rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR IKM tertimbang x 30
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang tersisa
- NRR Per Tertimbang per Unsur = NRR per unsur x 0,083

No.	UNSUR PELAYANAN	Rata-rata
U1	Prosedur pelayanan	2.909
U2	Persyaratan pelayanan	2.909
U3	Keamanan unit pelayanan	2.909
U4	Kejelasan Petugas yang melayani	2.818
U5	Tanggung jawab petugas pelayanan	3.000
U6	Kemampuan petugas pelayanan	3.000
U7	Keadilan mendapatkan pelayanan	2.909
U8	Kedisiplinan petugas pelayanan	2.909
U9	Kecepatan pelayanan	2.818
U10	Kesopanan dan keramahan petugas	3.000
U11	Ketepatan waktu pelayanan	2.273
U12	Kenyamanan unit pelayanan	3.000

IKM UNIT PELAYANAN 85.79

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00
B (Baik) : 62,51 - 81,25
C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50
D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75

Selatpanjang, 17 January 2022
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

SAKINUL WADI, S.H.I
19800823 201102 1 001

Digitized dengan CamScanner

DATA EVIDEN (7)

PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN

FORMULASI PENGHITUNGAN

$$\frac{Jumlah\ dokumen\ yang\ disusun\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ dokumen} \text{ x } 100\ \%$$

REKAP KEGIATAN KAJIAN DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 YANG DILAKSANAKAN DAN DIMANFAATKAN

NO	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KETERANGAN
I	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**			
1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat	330.955.440.00	153.861.184	Sudah dilaksanakan dan dimanfaatkan
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	222.258.000.00	182.562.721.00	Sudah dilaksanakan dan dimanfaatkan
3	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	213.456.280.00	101,946,719.00	Sudah silaksanakan dan belum dimanfaatkan
II	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**			
1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	20.892.000.00	16.155.783.00	Tidak terlaksana dan tidak dimanfaatkan
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
III	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**			
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	199,984,450.00	141,646,471.00	Sudah dilaksanakan dan dimanfaatkan

RINGKASAN

- Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan perencanaan awal dan penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh pihak-pihak lain.
- Untuk kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Sudah dilaksanakan proses pendaftaran IG Sagu Meranti dan sampai ke tahap penilaian dari Kemenkum HAM RI, setelah silaksanakan penilaian dan keluar sertifikat IG Sagu Meranti baru bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha maupun masyarakat meranti.

Selatpanjang, 14 Januari 2022
Plt. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kepulauan Meranti,

M. SAKINUL WADI, S.H.I
Penata TK I / III d
NIP. 19800823 201102 1 001